

**PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)  
TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN  
BERBAHAYA DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi  
Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah



Disusun Oleh

**DEVI YULIANTINA**

NIM. 1302120260

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PRODI EKONOMI SYARIAH KELAS A  
TAHUN 2017 M / 1439H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA PALANGKA RAYA**

**NAMA : DEVI YULIANTINA**

**NIM : 1302120260**

**FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JURUSAN : EKONOMI ISLAM**

**PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH**

**JENJANG : STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, September 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**DR. SADIANI, MH**  
**NIP.19650701 199803 1 003**

  
**JHONY A. S. PUTRA, M.M**  
**NIP. 19890624 201609 26 22**

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan  
Ekonomi Syariah

  
**DRA. HJ. RAHMANIAR, M.SI**  
**NIP. 195406301981032001**

  
**ITSLA YUNISVA AVIVA, M. E.SY**  
**NIP. 198910102015032012**

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Devi Yuliantina**

Palangka Raya, September 2017

Kepada  
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**IAIN Palangka Raya**  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **DEVI YULIANTINA**  
Nim : **130 212 0260**  
Judul : **PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN  
PRODUK MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA  
PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

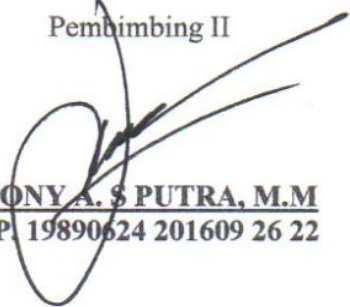
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**DR. SADIANI, MH**  
NIP.19650101 199803 1 003

Pembimbing II

  
**JHONY A. S PUTRA, M.M**  
NIP. 19890624 201609 26 22

## PENGESAHAN

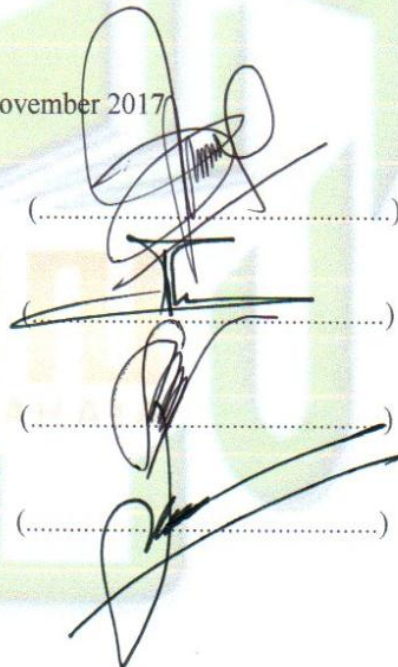
Skripsi yang berjudul **PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Devi Yuliantina NIM: 130 212 0260 telah di *munaqasyahkan* TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 07 November 2017

Palangka Raya, 07 November 2017

1. **M. Zainal Arifin, M.Hum**  
Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. Jirhanuddin, M.Ag**  
Penguji Utama/Anggota
3. **Dr. Sadiani, MH.**  
Penguji II/Anggota
4. **Jhony A. S. Putra, MM.**  
Sekretariat/Anggota



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



**DRA. HJ. RAHMANIAR, M.SI**  
**NIP. 195406301981032001**

**PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)  
TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN BERBAHAYA DI  
KOTA PALANGKA RAYA  
ABSTRAK**

**Oleh DEVI YULIANTINA**

Sebagai salah satu petak kecil dari aktivitas ekonomi, tidak terbantahkan bahwa bisnis merupakan salah satu aktivitas kehidupan manusia. Adanya fenomena ini mustahil orang terlepas dari pengaruh bisnis dan sebagai konsekuensinya, lemahnya posisi konsumen menjadikan konsumen sebagai sasaran para produsen dimana-mana. BPOM sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengawasi makanan seyogyanya harus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen dari aktivitas pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen sebagai pengguna produk makanan. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran BPOM dalam mengawasi peredaran produk makanan berbahaya di Palangka Raya dan Pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya di Palangka Raya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, subjek penelitian ini adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan) Palangka Raya dan pelaku usaha /distributor, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Balai POM dalam mengawasi produk makanan di Palangka Raya adalah mereka melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan di Palangka Raya menggunakan 2 tahapan yaitu *pre market* dan *post market* dari awal proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum makanan dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provins dan Instansi Lain yang terkait. Pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya di Palangka Raya adalah masih belum optimal dikarenakan jumlah pegawai pengawas peredaran makanan di Kota Palangka Raya masih minim tidak sebanding dengan banyaknya jumlah Kota/Kabupaten dan komoditi yang diawasi BPOM serta rendahnya kepatuhan dan pengetahuan konsumen dan pelaku usaha. Solusi dalam mengatasi hambatan atau kendala BPOM yaitu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Instansi Lain yang terkait serta BPOM melakukan pemberdayaan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen maupun pelaku usaha melalui kegiatan komunikasi, edukasi, serta informasi.

Kata Kunci : Balai POM, Produk Makanan



# **THE ROLE BPOM TO CIRCULATION OF HARMFUL FOOD PRODUCTS IN PALANGKA RAYA CITY**

## **ABSTRACT**

**By DEVI YULIANTINA**

As one small plot of economic activity, it is undeniable that business is one of the activities of human life. The existence of this phenomenon impossible people regardless of business influence and as a consequence, weak consumer position makes consumers as the target of the producers everywhere. BPOM as an extension of the government in supervising the food should make an active effort to protect consumers from business activities that potentially harm consumers as users of food products. So, the purpose of this research are to know and analyze how BPOM role in overseeing the circulation of dangerous food products in Palangka Raya and the implementation of BPOM supervision on economic actors distributing dangerous food products in Palangka Raya.

This research uses descriptive qualitative method, the subject of this research are BPOM in Palangka Raya and business actors/ distributors, data collection techniques using observation, interview, and documentation methods. Data validation uses source triangulation by collecting similar data and information from different sources.

The results of this study indicate that the role of BPOM in supervising food products in Palangka Raya is that they carry out government duties in the field of drug and food supervision in Palangka Raya using 2 stages of pre market and post market from the beginning of production process, raw material processing stage, before the food is marketed and consumed by the community and consumed by the community and in cooperation with Provincial Health Office and other related Institution. The implementation of BPOM supervision on economic actors distributing dangerous food products in Palangkaraya are still not optimal because the number of supervisors of food circulation in Palangkaraya City are still not equal to the number of cities / regencies and commodities controlled by BPOM and the low compliance and knowledge of consumers and businessmen. Solutions to overcome obstacles or constraints BPOM is working with the Provincial Health Office and other related agencies and BPOM empowerment, raising awareness and knowledge of consumers and business actors through communication, education, and information.

Key word : BPOM, Food Products

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA PALANGKA RAYA”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumil qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. Selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Itsla yunisva aviva, M.E.sy selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I selaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.
5. Bapak Dr. Sadiani, M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Jhony A. S Putra, M.M selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia memberikan

membimbing peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh staf yang ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palangka Raya, Agustus 2017  
Peneliti

Devi Yuliantina  
Nim. 1302120260



## PERNYATAAN ORISINALITAS

الرَّحِيمَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA PALANGKA RAYA**”, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

الرَّحِيمَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA PALANGKA RAYA**”, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan,

  
**DEVI YULIANTINA**

NIM. 130 212 0260

## MOTTO

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾

“Hendaklah manusia memperhatikan makanannya”.  
(QS. ‘Abasa: 24)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka Makanlah yang halal lagi baik dari rezeki  
yang telah diberikan Allah kepadamu  
dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya  
menyembah”  
(QS. An-Nahl: 161)

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini, saya persembahkan kepada:

- ♥ Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tiada kenal lelah dan hentinya dalam memberikan kasih sayang, doa, dan semangatnya selama ini.
- ♥ Seluruh dosen dan staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya khususnya Fakultas Ekonomi Islam yang penuh dengan keikhlasan dan kesabaran dalam mengajarkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat .
- ♥ Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya khususnya Ekonomi Syariah dengan semua pengalaman dan kenangan yang kita lewati bersama selama menempuh pendidikan tercinta ini.
- ♥ Kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em

ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	w	we
هـ	<i>Hā'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهنمة	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

**D. Vokal pendek**

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

**E. Vokal panjang:**

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang Alif + Lām

##### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>



# **I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	5
C.Tujuan Penelitian .....	5
D.Batasan Masalah.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
A.Penelitian Terdahulu .....	8
B.Kajian Teori .....	13
1. Teori Lembaga <i>Hisbah</i> Sebagai Bentuk Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam.....	13
2. Teori Perlindungan Konsumen .....	18
3. Teori <i>Maqāshid Syarī'ah</i> .....	20
C.Kerangka Konsep .....	23
1. Deskripsi Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ....	23

2. Deskripsi Pengawasan .....	24
3. Pengertian Pelaksanaan.....	27
4. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha .....	29
5. Ruang Lingkup Peredaran Produk .....	36
6. Makanan Halal dan Baik.....	39
7. Keamanan Pangan.....	41
D.Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A.Waktu dan Lokasi Penelitian .....	48
B.Pendekatan dan jenis Penelitian .....	48
C.Subjek dan Objek Penelitian .....	49
D.Teknik Pengumpulan Data.....	51
E.Pengabsahan Data .....	53
F. Teknik Analisis Data.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A.Gambaran Umum Kota Palangka Raya dan BPOM .....	55
1. Gambaran Kota Palangka Raya .....	55
2. Gambaran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	58
B.Hasil Penelitian .....	63
1. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Produk makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya.....	63
2. Pelaksanaan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Ekonomi yang Mengedarkan Produk Makanan Berbahaya di Palangka Raya .....	77
C.Analisis Penelitian.....	98

1. Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Produk makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya.....	98
2. Pelaksanaan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Ekonomi yang Mengedarkan Produk Makanan Berbahaya di Palangka Raya .....	114
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	130
C. Keterbatasan penelitian.....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2. Data Subjek dari BPOM.....	50
Tabel 3. Data Informan Selaku Pelaku Usaha.....	50
Tabel 4. Data Super Market/Department Store Kota Palangka Raya.....	72
Tabel 5. Pasar Tradisional Kota Palangka Raya.....	73
Tabel 6. Data Produk Pangan yang diawasi BPOM.....	74
Tabel 7. Data Produk yang ditarik BPOM.....	75
Tabel 8. Data Profil Pegawai BPOM.....	95
Tabel 9. Data Kebutuhan SDM BPOM.....	96

## **DAFTAR SINGKATAN**

BPOM	: Balai Pengawasan Obat dan Makanan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CPPB	: Cara Produksi Pangan yang Baik
MD	: Makanan Dalam Negeri
ML	: Makanan Luar Negeri
PEMDIK SERLIK	: Seksi Pemeriksaan, Penyidikan Sertifikat, dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya
PIRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
SDM	: Sumber Daya Manusia
TPTPMB	: Tim Pengawasan Terpadu Pengawasan Makanan Berbahaya
ULPK	: Unit Layanan Perlindungan Konsumen
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, yaitu usaha komersial di dunia perdagangan. Dalam perdagangan terdapat aktivitas jual beli barang dan jasa. Aktivitas itu diperlukan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya.<sup>1</sup>

Pada perspektif Ekonomi Islam, ada tuntunan sekaligus tuntutan agar aktivitas bisnis dilakukan sesuai hukum Allah dengan memperhatikan aspek-aspek keridhaan dan kehalalannya. Penekanan kepada yang halal menjadi demikian penting, karena orang-orang yang memperoleh rezeki dari sumber-sumber yang haram dan dengan cara yang haram akan menimbulkan kerugian bagi kehidupannya di dunia ini bahkan mendapat azab di akhirat kelak.<sup>2</sup> Pada *al-Qur ān* dijelaskan bahwa perintah untuk makan dari yang halal dan yang baik tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, akan tetapi untuk semua manusia. Karena dalam ayat tersebut dituliskan kalimat ‘*yā ayyuhan nasu*’ yang artinya wahai manusia.<sup>3</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam *al-Qur ān* sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Muhammad & Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam: Kajian Spirit Etchico-Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktek Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia, 2014, h. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 253-254.



يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”(QS. Al-Baqarah (2):168)<sup>4</sup>

Konsep makanan berdasarkan ayat diatas tidak sekedar halal, baik dari cara memperolehnya, mengolahnya, hingga menyajikannya. Tetapi, makanan juga harus baik, baik secara fisik yang diharapkan tidak mengganggu kesehatan yang mengonsumsinya. Yang menarik adalah bahwa konsep makanan juga berkait dengan nilai ketuhanan, bahwa ketika kita menolak memakan makanan yang halal dan baik, maka Allah menganggap telah mengikuti jejak langkah setan, padahal setan adalah musuh nyata manusia.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu petak kecil dari aktivitas ekonomi, tidak terbantahkan bahwa bisnis merupakan salah satu aktivitas kehidupan manusia dan bahkan telah merasuki semua sendi kehidupan masyarakat modern. Dengan fenomena ini mustahil orang terlepas dari pengaruh bisnis dan sebagai konsekuensinya, masyarakat adalah konsumen yang menjadi sasaran para produsen dimana-mana.<sup>6</sup> Para pelaku bisnis bisa saja berasumsi bahwasanya bisnis merupakan aktivitas netral, di mana mereka terpanggil

<sup>4</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, 1990, h. 20.

<sup>5</sup>Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009, h. 158-160.

<sup>6</sup> Muhammad Djakfar, *Etika bisnis: Menangkap Spririt Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012, hal. 139

untuk memenuhi permintaan masyarakat tanpa mempertimbangkan apakah barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan merugikan, atau berpotensi merugikan konsumen. Sikap netral memang merupakan salah satu yang harus dipegang oleh pelaku bisnis. Mereka dibenarkan menawarkan barang yang dibutuhkan manusia asalkan tidak mendikte, apalagi memaksa konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk yang dihasilkan. Namun demikian akan lain lagi, jika motif produsen ingin memanfaatkan lemahnya posisi tawar konsumen dengan cara melakukan pemalsuan informasi, atau tidak memenuhi standar keamanan produk makanan, serta berbagai modus penipuan yang berpotensi merugikan konsumen sebagai pengguna sebuah produk makanan.<sup>7</sup>

Sebagaimana terjadinya kasus yang merugikan konsumen khususnya beragama Islam, dengan terkuaknya *Mi Samyang Cheese Ramen* yang mengandung babi merupakan produk makanan impor dari *Samyang Foods Co.Ltd*, perusahaan yang berkududukan di Korea Selatan. *Mi Samyang* tersebut belum mendapatkan izin untuk dipasarkan di Indonesia atau tidak ada label dari BPOM, padahal makanan yang beredar di dalam negeri harus mencantumkan informasi barang dalam bentuk Bahasa Indonesia dan memiliki izin edar dari BPOM. Hal ini apabila tidak ada mencantumkan informasi dan label maka sangat jelas merupakan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen.<sup>8</sup> Menurut Islam, melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Surat Kabar Kalteng Pos, Minggu 22 Januari 2017.

konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan. Telaah atas perlindungan konsumen muslim atas produk barang dan jasa menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh konsumen Indonesia mayoritasnya merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan gambaran diatas, sesuai dengan tugas dan wewenang BPOM adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Jadi, BPOM sebagai perpanjangan tangan pemerintah seyogyanya harus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen. Perlindungan tersebut merupakan hak warga negara dan juga merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya untuk mengonsumsi produk yang halal.

Disinilah peranan BPOM selaku instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha mengedarkan makanan ke masyarakat harus mendaftarkan produknya kepada BPOM. Agar diharapkan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, aman dan terhindar dari tindakan yang merugikan konsumen. Permasalahan inilah yang menjadi dasar penelitian skripsi dengan judul “**Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya**”.

---

<sup>9</sup>*Ibid.,*

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dengan ini peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran produk makanan berbahaya di Palangka Raya?
2. Bagaimana pelaksanaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya di Palangka Raya?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran produk makanan berbahaya di Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya di Palangka Raya.

**D. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti merasa perlu memberikan batasan permasalahan yaitu pada peranan pengawasan terhadap peredaran produk makanan berbahaya di Kota Palangka Raya. Pada salah

satu tugasnya melakukan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

##### **a. Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti dibidang keilmuan ekonomi syariah.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan konstribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual.
- c. Dapat dijadikan bahan materi dan masukan yang berguna dalam melaksanakan penelitian terhadap masalah yang berkaitan sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

##### **b. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan s1 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dari penelitian dari penelitian ini, terdiri dari 5 Bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, kajian teori dan konsep, yang terdiri tinjauan pustaka yaitu telusuran atas penelitian sebelumnya, kajian teori meliputi: Teori Lembaga Hisbah Sebagai Bentuk Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam, teori perlindungan konsumen, dan teori *Maqāshid Syarī'ah*, Kerangka konsep yang meliputi: deskripsi Peran BPOM, deskripsi pengawasan, deskripsi pelaksanaan, Pengertian konsumen dan pelaku usaha, ruang lingkup peredaran produk, makanan halal dan baik, dan keamanan pangan.

Bab III, metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan penedekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan analisis tentang peran Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran produk makanan berbahaya di Palangka Raya dan pelaksanaan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya di Palangka Raya.

Bab V, Penutup memuat kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya. Berikut ini peneliti mencantumkan 3 (Tiga) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Meliza Edtriani, S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Bina Widya Pada Tahun 2012, dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekan baru Tahun 2012. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman tanpa izin edar di Kota Pekanbaru belum optimal. Dikarenakan masih terdapat makanan dan minuman tanpa izin edar yang beredar dipasaran.

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah rendahnya integritas pengawasan yang didasari oleh keterbatasan jumlah staf BBPOM dan rendahnya sistem pengawasan BBPOM terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa izin edar karena dalam prakteknya



BBPOM melakukan pengawasan secara berskala dan acak.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Meliza Edtriani tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu pelaksanaan pengawasan Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Perbedaan antara Penelitian yang dilakukan oleh Meliza Edtriani dengan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Meliza Edtriani mengenai pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa izin edar. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai peran BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Norita Palita Silalahi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun 2011, dengan judul Skripsi Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) atas beredarnya Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat yang beredar di Yogyakarta. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa peranan BPOM dalam mengawasi peredaran produk obat tradisional di Kota Yogyakarta dapat dikatakan masih lemah. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sebulan sekali tidak berjalan efektif dikarenakan masih banyak terdapat penjual atau peredaran produk Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan kurangnya tindakan pencegahan serta diterapkan sanksi hukuman yang tegas atau dengan kata lain sanksi yang diterapkan masih dinilai ringan.

---

<sup>10</sup>Meliza Edtriani, Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru, Skripsi Universitas Bina Widya, Pekanbaru, 2012.

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah hambatan internal yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia BPOM Yogyakarta, kurangnya sarana dan fasilitas BPOM Yogyakarta yang belum mampu mengimbangi beban kerja yang semakin bertambah serta langkanya beberapa komoditi OMKA (Obat, Makanan, Kosmetik, dan Alat Kesehatan) sebagai bahan baku pembanding yang tercantum dalam prioritas *sampling*. Sedangkan, hambatan eksternal yaitu rendahnya sumber daya manusia baik produsen maupun konsumen, dan masih rendahnya sanksi yang diterima pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Norita Palita Silalahi tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu pelaksanaan pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Penelitian yang dilakukan oleh Norita Palita Silalahi mengenai Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) atas beredar Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat yang beredar. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai peran BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya.

Selanjutnya penelitian dari Gaery Rahman Saputra, Prodi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Manajemen Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang- Banten, 2014, dengan judul skripsi Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan

---

<sup>11</sup>Norita Palita Silalahi, Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) atas beredar Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat yang beredar di Yogyakarta, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

(BPOM) Provinsi Banten Dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Serang. Penelitian ini mengenai tugas dari BPOM Semarang terkait dengan pengawasan terhadap Dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Serang, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan peredaran obat tradisional oleh BPOM Provinsi Banten mengingat masih banyak ditemukan produk obat dan makanan yang berbahan kimia obat (BKO), ilegal, dan kadaluarsa beredar di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPOM belum optimal, dikarenakan jumlah sumber daya manusia pengawas yang masih minim, kurangnya kelengkapan sarana, kurang meratanya sosialisasi informasi mengenai obat tradisional dan *public warning* serta terpusatnya pengawasan yang dilakukan pada satu wilayah.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Gaery Rahman Saputra tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu pelaksanaan pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Penelitian yang dilakukan oleh Gaery Rahman Saputramengenai pengawasan dalam peredaran obat tradisional. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai peran BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya

---

<sup>12</sup>Gaery Rahman Saputra, Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten Dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Serang, Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.

**Tabel. 1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun, Jenis Penelitian,	Persamaan	Perbedaan
1	Meliza Edtriani, Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekan, Tahun 2012, Kualitatif.	Penelitian yang dilakukan oleh Meliza Edtriani tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu pelaksanaan pengawasan Balai Pengawasan Obat dan Makanan.	Penelitian yang dilakukan oleh Meliza Edtriani mengenai pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa izin edar. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai peran BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya.
2	Norita Palita Silalahi, Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) atas beredarnya Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat yang beredar di Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, kuantitatif	Penelitian yang dilakukan oleh Norita Palita Silalahi tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu pelaksanaan pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.	Penelitian yang dilakukan oleh Norita Palita Silalahi mengenai Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) atas beredarnya Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat yang beredar. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai peran BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya.
3.	Gaery Rahman Saputra, Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten Dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014, Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh Gaery Rahman Saputra tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu pelaksanaan pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.	Penelitian yang dilakukan oleh Gaery Rahman Saputramengenai pengawasan dalam peredaran obat tradisional. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai peran BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Lembaga *Hisbah* Sebagai Bentuk Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam

Pengetahuan akan pasar mencakup bahasan tentang bagaimana seharusnya seorang produsen, distributor, dan konsumen berperilaku, bertransaksi, dan membangun suatu jaringan bisnis. Begitu juga pengetahuan terhadap pengawasan secara internal dan eksternal dalam suatu pasar. Kerangka dasar dalam ekonomi Islam adalah *demand* memberikan *Fālah* kepada *supplier*, agar *supplier* terus konstan, dan begitu juga sebaliknya.

Pengawasan internal dalam pasar mencakup bagaimana seorang pelaku pasar bersikap baik dalam segala bentuk transaksi yang dilakukannya. Perilaku yang baik dalam diri seorang pelaku pasar di dasarkan atas dasar ajaran Islam. Ketika seseorang sudah bersyahadat dan mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, maka kewajibannya tidak hanya berhenti di wilayah ibadah yang bersifat ritual, seperti sholat. Akan tetapi ketika ia berdagang, memproduksi dan mengkonsumsi suatu barang dan segala macam aktivitas lainnya, harus didasarkan karena motivasi ibadah kepada Allah SWT. Dengan begitu, maka ia akan selalu mengawasi dirinya agar tidak masuk ke area yang dilarang oleh Allah. Ia akan menghindari perbuatan yang merugikan

orang lain. Dengan begitu mekanisme pasar akan terhindar dari berbagai macam kejahatan dan kecurangan.<sup>13</sup>

Adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh suatu institusi pengawas pasar yang biasa disebut dengan *hisbah*. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari perilaku yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dalam pasar. Seseorang pengawas pasar (*Muhtā'sib*) mempunyai kewenangan untuk menindak para pelaku kejahatan di dalam pasar. Kejahatan tersebut bisa saja berbentuk beberapa kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak mana pun.

Rasulullah SAW sering kali mengunjungi pasar. Terkadang Beliau memberi nasihat, akan tetapi tak jarang teguran atau Pendidikan. Rasulullah juga menempatkan Said bin Said ibn al-Ash di pasar Mekkah, sebagai kepala pasar. Contoh teguran secara langsung yang dilakukan oleh Rasulullah kepada salah satu pelaku usaha. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan

<sup>13</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syaria...*, h. 213-216

agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 69 ).<sup>14</sup>

Aturan pengawasan dimulai dengan ditunjuknya seseorang untuk mengawasi kegiatan perekonomian yang sedang berjalan, dalam hal ini oleh pemerintah. Sehingga aturan yang dibuat memiliki sifat terikat dan haruslah ditaati oleh masyarakat. Hal ini juga merupakan perintah Allah mengenai taat kepada pemerintah adalah wajib, selama tidak dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 59)<sup>15</sup>

Adapun cara-cara pengawasan yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan, antara lain: (1) dengan memberikan teguran kepada yang melanggar; (2) dengan memberikan nasihat ketika teguran tidak berhasil; (3) dengan tindakan (dengan syarat dalam Batasan yang wajar); dan (4) pelaku kejahatan pasar di penjara. Dalam Islam

<sup>14</sup> Muhammad Nashirudin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Jakarta: Pustaka Azzam, h. 665.

<sup>15</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta, 1990, h. 69



dikenalkan suatu konsep tanggung jawab negara di dalam mengawasi pertumbuhan ekonomi, yang di dalamnya juga membahas tentang pengawasan negara terhadap praktik-praktik muamalat yang dilarang.<sup>16</sup>

Secara khusus, Ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi muhtasib adalah mengawasi pasar. *Muhtāsib* adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktek transaksi dan kegiatan antara penjual dan pembeli di pasar agar benar-benar mengikuti aturan *syarī'ah*, tidak ada kecurangan dan penipuan dalam ukuran takaran dan timbangan dan masalah harga. *Muhtāsib* juga berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar. Mengawasi aktivitas pasar, tugas muhtasib terdiri dari:

- 1) Pengawasan harga, ukuran, takaran dan timbangan.

Tugas ini sangat penting, karena seringkali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-masalah ini yaitu masalah harga, kuantitas dan kualitas barang. *Muhtāsib* harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku di pasar. Ia juga menguji timbangan dan standar ukuran yang dipakai pedagang. *Muhtāsib* berwenang menetapkan standar ukuran dan timbangan yang berlaku. Ia juga harus memberikan informasi yang jelas kepada setiap orang tentang harga yang berlaku. Untuk mengawasinya muhtasib dapat memerintahkan

---

<sup>16</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syaria...*, h. 213-216.

setiap pedagang untuk menempel daftar harga (*price list*) yang berlaku.

2) Mengawasi jual beli terlarang.

*Muhtāsib* bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang *syarī'ah* baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam.

3) Mengawasi standar kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas.

*Muhtāsib* harus melakukan *Quality control* atas barang-barang yang beredar di pasar. Dia adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar.

4) Pengaturan pasar.

*Muhtāsib* bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar. Ia mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek atau meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. *Muhtāsib* juga mengatur tata letak pasar, sehingga *Muhtāsib* lebih mudah melakukan pengawasan pasar.

5) Melakukan *intervensi* pasar.

*Muhtāsib* adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan *intervensi* pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan. Ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali.

- 6) Memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran.

*Muhtāsib* bertugas mencegah kemunkaran dan pelanggaran berbagai ketentuan di pasar dan memberikan sanksi yang tepat serta tindakan korektif. Ketika para pembeli atau pedagang melakukan tindakan pelanggaran, misalnya menipu, curang, ihtikar, transaksi gharar, riba dan jual beli terlarang lainnya yang berakibat pada rusaknya stabilitas pasar, *Muhtāsib* harus menegur, memberi peringatan atau mengancam. Tetapi jika tidak diindahkan *Muhtāsib* berwenang menghukum mereka sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.<sup>17</sup>

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

---

<sup>17</sup>Rozalinda, “Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam”, 2010, diakses dari: <https://roزالinda.wordpress.com/2010/05/10/pengawasan-pasar-perspektif-ekonomi-islam/>. Pada hari: Selasa, 03 Januari 2017, pukul 08:00 WIB).

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>18</sup>

Azas-azas perlindungan konsumen antara lain, sebagai berikut :

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>19</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 73-74

Tujuan dari perlindungan konsumen ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.<sup>20</sup>

### 3. Teori *Maqāshid Syarī'ah*

Pada dasarnya secara bahasa *Maqāshid Syarī'ah* di konstruksi dari dua suku kata, yaitu *Qashāda* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāshid* dari bentuk *jamā'* dari *maqsud* berarti kesengajaan atau tujuan atau hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan, dan *Syarī'ah* yang secara bahasa artiya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber kehidupan.<sup>21</sup>

Dari memaparkan hakikat *Maqāshid Syarī'ah*, bahwa dari segi substansi *Maqāshid Syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *tāk'lif* Tuhan dapat berwujud dalam bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua,

<sup>20</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 56-57.

<sup>21</sup> Muhammad & Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam: Kajian Spirit Etchico-Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktek bnak Islam Modern...*, h. 32.

dalam bentuk *majā'zi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>22</sup>

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *Maqāshid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *Dharuriyāt*, *Hā'jiyāt*, *Tāhsīniyāt*. Pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencapai tujuan pensyari'atan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Ketiga tingkatan tersebut yaitu:

#### 1. *Maqāshid al- Dharuriyāt*

*Maqāshid al- Dharuriyāt* atau tujuan primer adalah tujuan hukum yang harus ada demi adanya kehidupan manusia, baik dalam hal agama maupun dalam hal kehidupan di dunia. *Maqāshid* ini dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Apabila tujuan primer ini tidak tercapai maka akan menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan manusia. Tujuan primer ini hanya tercapai apabila kelima unsur pokok kehidupan tersebut dapat dijaga.

#### 2. *Maqāshid al-Hajiyat*

---

<sup>22</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, h. 69-70.

Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Maqāshid al-Hā'jiyāt* adalah segala yang dihajati oleh masyarakat untuk menghindari masyaqaah atau kesulitan guna menghilangkan kepicikan. Apabila *Maqāshid al-Hā'jiyāt* ini tidak dapat diwujudkan maka hal tersebut tidak menyebabkan akibat yang buruk bagi kehidupan manusia, hanya sekedar menimbulkan kesempitan. *Maqāshid* ini berlaku dalam masalah ibadah, adat atau kebiasaan, muamalah dan *jinayāh*.

### 3. *Maqāshid al-Tāhsīniyāt*

*Maqāshid al-Tāhsīniyāt* atau tujuan-tujuan tersier adalah mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya dicakup oleh bagian *makarim al-akhlaq*. Definisi lain menyebutkan bahwa *maqāshid al-tāhsīniyāt* adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan melaksanakan hal-hal yang baik dan benar menurut *syarā'* dan adat kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. *Maqāshid al-Tāhsīniyāt* ini dicapai melalui hal-hal yang berbentuk budi pekerti atau *akhlak al-karimah*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah-langkah sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 280-281.

## C. Kerangka Konsep

### 1. Deskripsi Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>24</sup>

Menurut Soekanto pengertian peran yaitu:

Peran merupakan aspek yang dinamis demi kedudukan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat dalam arti merupakan rangkaian peraturan dalam membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

Soekanto juga mengemukakan peranan merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan juga merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perilaku atau perihal apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan organisasi.
- c. Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur organisasi.<sup>26</sup>

Jadi berdasarkan pada beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa peranan adalah suatu tingkah laku yang berhubungan usaha seseorang dalam rangka meningkatkan atau memajukan suatu

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 854.

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1987, h. 225.

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1987, h. 221.



keadaan, tidak terlepas dari norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan posisinya dalam situasi tersebut.

Keputusan presiden Pasal 67 No. 103 Tahun 2001 menyatakan bahwa tugas dan wewenang BPOM adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Badan POM berfungsi antara lain:

- a. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi
- b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik
- c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar
- d. *Post marketing vigilance* termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
- e. *Pre-audit* dan *pasca-audit* iklan dan promosi produk
- f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
- g. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.<sup>27</sup>

## 2. Deskripsi Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem

---

<sup>27</sup>POM, “BPOM”, di akses dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan). Pada hari: Selasa, 03 Januari 2017, pukul 08:00 WIB

umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.<sup>28</sup>

Menurut Sitomarang, mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut dan saran yang hendak dicapai”<sup>29</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Sedangkan, sifat dan waktu pengawasan terdiri dari:

1. *Preventive Controll*, adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelumnya, agar dalam suatu kegiatan pekerjaan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. *Preventive Controll* ini dilakukan dengan cara:
  - a) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
  - b) Membuat peraturan dan pedoman kerja.
  - c) Menetapkan sanksi terhadap pekerja yang bersalah.

---

<sup>28</sup> Saputra Gaery Rahman, “Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ..

<sup>29</sup> Ibid.,

- d) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang maupun tanggung jawab.
  - e) menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
  - f) mengkoordinasikan segala kegiatan.
2. *Repressive Controll*, adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah pekerjaan dilakukan. pengawasan ini biasanya disebut sebagai pemeriksaan. Tujuannya, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan maka diharapkan setelah pemeriksaan itu kesalahan serupa tidak akan terulang lagi. *Repressive Controll* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a) Membandingkan antara hasil dengan rencana kegiatan.
  - b) Mencari sebab terjadinya penyimpangan dan perbaikannya.
  - c) Melaksanakan sanksi kepada pegawai yang bersalah.
  - d) Memberi penilaian terhadap hasil kerja.
  - e) Mengecek laporan dari para petugas pelaksana.
3. Pengawasan saat terjadinya proses penyimpangan, ini dapat juga dilaksanakan pada saat ditemukan penyimpangan. pelaksanaan pengawasan seperti ini lebih cenderung disebut sebagai pemeriksaan.
4. Pengawasan berkala, ini secara periodik seperti sebulan sekali, satu kuartal sekali, satu semester atau satu tahun sekali.

5. Pengawasan mendadak, dilakukan dengan peninjauan mendadak. hal ini ditunjukan untuk mendorong atau memacu tanggung jawab pegawai agar mereka siap loyal kepada pekerjaan.

Berdasarkan diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang baik harus memiliki atau melalui tahapan-tahapan tertentu sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan, serta memiliki waktu-waktu tertentu dalam proses pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.<sup>30</sup>

### 3. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>31</sup>

Menurut Westa pengertian Implementasi atau pelaksanaan yaitu:

“Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Ekhaardi, “Pelaksanaan”, di akses dari: <http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/12/pelaksanaan.html>, pada Minggu, 15 Oktober 2017, pukul 08:00 WIB.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi. Sedangkan, pelaksanaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

Faktor-faktor dari pelaksanaan adalah :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi

program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

- d. Struktur birokrasi yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.<sup>33</sup>

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting, yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan,
- c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.<sup>34</sup>

#### **4. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha**

- a. Konsumen

Pada hakekatnya, konsumen mengandung pengertian yang luas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Amerika

---

<sup>33</sup> *Ibid.,*

<sup>34</sup> *Ibid.,*

Serikat, John F. Kennedy, *Consumer by definition include us all*” (Secara definisi, semua dari kita termasuk konsumen). Sedangkan, definisi konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun proses produksi selanjutnya.”<sup>35</sup>

Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>36</sup>

Ternyata pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang pemeliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang atau jasa.<sup>37</sup>

#### 1) Hak konsumen

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa

---

<sup>35</sup>Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, h. 128-129.

<sup>36</sup>Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>37</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2008, h. 63

- b) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>38</sup>

## 2) Kewajiban konsumen

---

<sup>38</sup> Abdul rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2011, h.192-193.



- a. Membaca, mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>39</sup>

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distribusi, dan lain-lain.<sup>40</sup>

1) Hak Produsen (pelaku usaha/wirausahawan)

---

<sup>39</sup>Junaidi Abdullah, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010 h.129-130.

<sup>40</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014, h. 196.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- a) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  - b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
  - c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
  - d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  - e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban produsen
- a) Beritikad baik dalam kegiatan usahanya
  - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
  - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku
  - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
  - f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  - g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>41</sup>
- 3) Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha
- a) Pelaku usaha dilarang menawarkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan keterangan, iklan atau promosi atas penawaran jasa tersebut. Tidak membuat perjanjian atas pengikatan jasa tersebut dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>41</sup> Mulyadi Nitisusatro, *Perilaku Konsumen; Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Penerbit Alfabeta, h. 260-261.

- b) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain
- c) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai
- d) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya
- e) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: (a). Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; (b). Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; (c). Memberikan hadiah tidak sesuai dengan

yang dijanjikan; (d) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.<sup>42</sup>

## 5. Ruang Lingkup Peredaran Produk

Peredaran adalah pengadaan, pemberian, penyerahan, pengangkutan, penjualan dan penyediaan di tempat, serta penyimpanan untuk penjualan.<sup>43</sup>

Produk adalah segala suatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya.<sup>44</sup> Kalau didefinisikan secara luas produk meliputi objek secara fisik, pelayanan, orang, tepat, organisasi, gagasan, atau bauran dari semua wujud diatas.<sup>45</sup> Dari defisini ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk produk merupakan benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dirasakan.

Produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok:

### a. Berdasarkan Karakteristik/sifat:

#### 1) Barang tahan lama (*durable goods*).

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak. Contohnya: mobil, lemari es, dan lain-lain.

---

<sup>42</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunson, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2008, h. 162-165.

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 239/MenKes/Per/V/85 mengenai Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

<sup>44</sup> Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran; Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h. 67.

<sup>45</sup> Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, h. 153

2) Barang tidak tahan lama (*nondurable goods*).

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya: sabun, pasta gigi, minuman kaleng, dan sebagainya.

b. Berdasarkan wujudnya

Produk berdasarkan wujudnya dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama, yaitu:

- 1) Barang nyata atau berwujud, yaitu produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya.
- 2) Barang tidak nyata atau tidak berwujud (jasa). Jasa merupakan aktivitas, manfaat dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual (dikonsumsi pihak lain). Seperti halnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel dan sebagainya.<sup>46</sup>

c. Berdasarkan tujuan atau pemakaian.

- 1) Produk konsumsi, yaitu barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual lagi. Barang-barang termasuk produk konsumsi ini antara lain sebagai berikut.
  - a) Barang kebutuhan sehari-hari, yaitu barang yang umumnya seringkali dibeli, segera dan memerlukan usaha

---

<sup>46</sup>Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran; Pendekatan Praktis...*, h. 68-69.

yang sangat kecil untuk memilikinya, misalnya barang kelontong, baterai, dan sebagainya.

- b) Barang belanja, yaitu barang yang dalam proses dibeli oleh konsumen dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian mutu, harga, dan model, misalnya pakaian, sepatu, sabun, dan lain sebagainya.
  - c) Barang khusus, yaitu barang yang memiliki ciri-ciri unik atau merk kas dimana kelompok konsumen berusaha untuk memiliki atau membelinya, misalnya mobil, kamera, dan lain sebagainya.
- 2) Produk industri adalah barang Produk industri (*business products*), adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran. Barang industri juga dapat dirinci lebih lanjut jenisnya antara lain sebagai berikut.
- a) Bahan dan suku cadang, yaitu barang-barang yang seluruhnya masuk ke dalam produksi jadi.
  - b) Barang modal, yaitu barang-barang yang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir.
  - c) Perbekalan layanan/operasional, yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi sektor industri, misalnya alat-alat kantor, dan lain-lain.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 69-73.

## 6. Makanan Halal dan Baik

Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia terbentuk dari apa yang dimakannya. Dari makanan itu pula dihasilkan tenaga atau energi yang perlu untuk kelangsungan hidup dan untuk aktivitas fisiknya. Apabila tidak ada makanan, niscaya tidak ada kehidupan di dunia ini.<sup>48</sup>

Kata *halalan*, bahasa Arab berasal dari kata *hālla* yang berarti ‘lepas’ atau ‘tidak terikat’. Secara etimologi kata *halalan* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedang kata *thā'yyib* berarti ‘lezat’, ‘baik’, ‘sehat’, ‘menentramkan’ dan ‘paling utama’. Syarat makanan halal. Suatu makanan dikatakan sebagai makanan halal adalah jika memenuhi syarat berikut ini:

1. Halal zatnya yaitu tidak mengandung zat atau makanan yang diharamkan seperti daging babi, bangkai, darah, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, alkohol maupun bahan-bahan lain yang sifatnya haram.
2. Tidak mengandung najis atau kotoran

Pada konteks makanan kata *thā'yyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau bercampur benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang

---

<sup>48</sup>Tien Ch. Tirtawinata, *Makanan dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006, h. 1.



selera bagi yang akan mengonsumsinya dan tidak membahayakan fisik serta akal nya juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proposional dan aman.

Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma halal, tapi juga baik (*Halalan thā'yyiban*) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Perintah ini juga ditegaskan dalam ayat yang lain, seperti yang terdapat pada sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu”(Q.S Al Baqarah : 168<sup>49</sup>)

Pertama kita ketahui, halal itu bukan sekedar halal makanannya, tapi juga dari sumber bagaimana mendapatkannya pun harus halal. Kalau sumbernya haram seperti korupsi, mencuri, merampok, menggusur tanah rakyat dengan harga yang rendah, maka makanan yang dimakan pun meski sebetulnya halal, tetap haram. Dan akan membuat si pemakannya disiksa di api neraka.

---

<sup>49</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta, 1990, h. 20.

Selain halal, makanan juga harus baik. Meski halal tapi jika tidak baik, hendaknya tidak kita makan. Di antara kriteria makanan yang baik adalah:

1. Bergizi tinggi
2. Makanan lengkap dan berimbang.
3. Tidak mengandung zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan kita
4. Alami. Tidak mengandung berbagai zat kimia seperti pupuk kimia, pestisida kimia, pengawet kimia (misalnya formalin), pewarna kimia, perasa kimia (misalnya biang gula/aspartame, MSG, dsb)
5. Masih segar. Tidak membusuk atau basi sehingga warna, bau, dan rasanya berubah
6. Tidak berlebihan. Makanan sebaik apa pun jika berlebihan, tidak baik.<sup>50</sup>

## **7. Keamanan Pangan**

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik.

---

<sup>50</sup>Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam...*, 2009, h. 102-108.

Selain itu, pangan harus layak dikonsumsi adalah pangan yang tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari Cemarkan Biologi, Kimia dan Cemarkan Fisik.

a. Cemarkan Biologi

Bisa berupa bakteri, kapang, jamur, parasit, virus dan ganggang. Pertumbuhan mikroba bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dimakan dan menyebabkan keracunan pada manusia bahkan kematian.

- 1) Faktor yang membuat bakteri tumbuh: pangan berprotein tinggi, kondisi hangat (suhu 40o - 60oC), kadar air, tingkat keasaman, waktu penyimpanan.
- 2) Cara pencegahan cemarkan biologi.
  - a) Beli bahan mentah dan pangan di tempat yang bersih.
  - b) Beli dari penjual yang sehat dan bersih.
  - c) Pilih makanan yang telah dimasak.
  - d) Beli pangan yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik.
  - e) Konsumsi pangan secara benar.
  - f) Kemasan tidak rusak.
  - g) Tidak basi (tekstur lunak, bau tidak menyimpang seperti bau asam atau busuk).
  - h) Jangan sayang membuang pangan dengan rasa menyimpang.

b. Cemarkan Kimia

Merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Cemarkan kimia masuk ke dalam pangan secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan bahaya.

- 1) Racun alami, contoh racun jamur, singkong beracun, racun ikan buntal, dan racun alami pada jengkol.
- 2) Cemarkan bahan kimia dari lingkungan, contoh: limbah industri, asap kendaraan bermotor, sisa pestisida pada buah dan sayur, deterjen, cat pada peralatan masak, minum dan makan, dan logam berat.
- 3) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang melebihi takaran, contoh: pemanis buatan, pengawet yang melebihi batas.
- 4) Penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, Contoh: Boraks, Formalin, Rhodamin B, Methanil Yellow.

Cara pencegahan cemarkan Kimia:

- 5) Selalu memilih bahan pangan yang baik untuk dimasak atau dikonsumsi langsung.
- 6) Mencuci sayuran dan buah-buahan dengan bersih sebelum diolah atau dimakan.
- 7) Menggunakan air bersih (tidak tercemar) untuk menangani dan mengolah pangan.

- 8) Tidak menggunakan bahan tambahan (pewarna, pengawet, dan lain-lain) yang dilarang digunakan untuk pangan.
- 9) Menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang dibutuhkan seperlunya dan tidak melebihi takaran yang diijinkan.
- 10) Tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam berat.
- 11) Tidak menggunakan peralatan/pengemas yang bukan untuk pangan.
- 12) Tidak menggunakan pengemas bekas, kertas koran untuk membungkus pangan.
- 13) Jangan menggunakan wadah sterofoam atau plastik kresek (non food grade) untuk mewadahi pangan terutama pangan siap santap yang panas, berlemak, dan asam karena berpeluang terjadi perpindahan komponen kimia dari wadah ke pangan (migrasi).

c. Cemarkan Fisik

Adalah benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam dan lain-lain. Benda-benda ini jika termakan dapat menyebabkan luka, seperti gigi patah, melukai kerongkongan dan perut. Benda tersebut berbahaya karena dapat melukai dan atau menutup jalan nafas dan pencernaan. Cara

pencegahan cemaran Fisik. Perhatikan dengan seksama kondisi pangan yang akan dikonsumsi.

5 (Lima) Kunci Keamanan Pangan, yaitu: 1). Jagalah kebersihan; 2). Pisahkan pangan mentah dari pangan matang; 3). Masaklah dengan benar; 4). Jagalah pangan pada suhu aman; 5). Gunakan air dan bahan baku yang aman.

Ciri Pangan Kemasan yang baik, yaitu: 1) Kemasan dalam kondisi baik tidak rusak, penyok atau menggelembung; 2). Pangan tidak kedaluwarsa atau rusak; 3). Sudah memiliki nomor izin edar: MD (Pangan yang diproduksi dalam negeri) ML (pangan yang diimpor dari luar negeri) PIRT (pangan yang diproduksi oleh rumah tangga).<sup>51</sup>

#### **D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian**

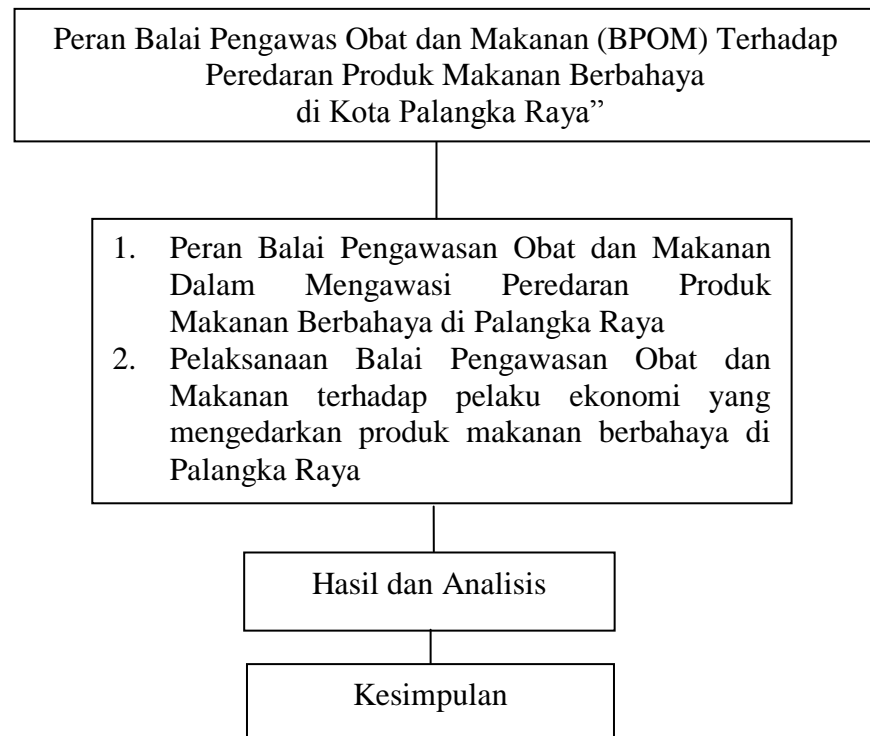
##### **a. Kerangka Pikir**

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan bebas dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan aplikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standart atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. BPOM dalam perannya sebagai pengawasan obat dan makanan harus bekerja secara efektif dan efisien, mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk

---

<sup>51</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2015. Pedoman Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman untuk Dewasa. Badan POM, Jakarta, h. 1-7

termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka peneliti membuat bagan penelitian sebagai berikut:



b. Pertanyaan Penelitian

a. Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Peredaran Produk Makanan Berbahaya di Palangka Raya

- 1) Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di bidang pengawasan obat dan makanan?
- 2) Apa saja barang atau pangan yang diawasi peredarannya oleh BPOM Kota Palangka Raya?

- 3) Apakah BPOM Kota Palangka Raya melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan pengawasan peredaran makanan?
- b. Pelaksanaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya di Palangka Raya
- 1) Bagaimana pelaksanaan waktu pengawasan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan?
  - 2) Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasandan bagaimana cara BPOMmengantisipasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut?
  - 3) Bagaimana tindakan BPOM dalam pelaksanaan pengawasan apabila ditemukan suatu pelanggaran dari pelaku ekonomi?



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan yaitu bulan Mei sampai Juni 2017. Pada BPOM Kota Palangka Raya, jalan Cilik Riwut Km 3.5.

#### **B. Pendekatan dan jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati.<sup>52</sup> Pendekatan kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa yang ada sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.<sup>53</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mengetahui dan menggambarkan penemuan atau fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian dijadikan peneliti sebagai data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada.

---

<sup>52</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h.13.

<sup>53</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004, h. 26.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Palangka Raya dan pihak lainnya yang terkait yaitu pelaku usaha/distributor.

Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek adalah *Purposive Sampling* yaitu metode penetapan informan dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan, artinya teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria Informan sebagai berikut:

1. Tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian.
2. kesediaan informan untuk diwawancarai.

Untuk subjek dari BPOM sendiri penulis mengambil dari Bagian Seksi Pemeriksaan, Penyidikan Sertifikat, dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya yaitu terdiri dari 2 orang, kepala, dan staf yang akan diwawancarai dan dimintai data-data tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

**Tabel. 2**  
**Data Subjek dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota palangka**  
**raya**

No	Nama	Pekerjaan/Jabatan	Jenis Kelamin
1.	GT	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan Sertifikat, dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya	Laki-laki
2.	AR	Staf Pemeriksaan, Penyidikan, sertifikat, dan Layanan Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya	Perempuan

Sedangkan, subjek dari pelaku usaha sendiri penulis mengambil dari Bagian pelaku usaha dibidang produksi dan distribusi yaitu terdiri dari 5 orang yang akan diwawancarai dan dimintai data-data tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

**Tabel. 3**  
**Data Informan Selaku Pelaku Usaha/ Pegawai**  
**Distributor Kota Palangka Raya**

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin
1.	FF	Staf Hypermart	Perempuan
2.	A	Staf PT. Kahayan Niaga Utama	Laki-laki
3.	ID	Penjual makanan siap saji	Laki-laki
4.	ICS	Penjual Air Minum Galon Isi Ulang	Laki-laki
5.	N	Pegawai Pabrik Pengolahan Tahu dan Tempe	Laki-laki

Sedangkan, objek penelitian ini adalah barang, dan/ jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen misalnya produk makanan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain<sup>54</sup>:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>55</sup> Wawancara menurut Moelong dalam bukunya *Metodologi Penelitian kualitatif* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan percakapan langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang

---

<sup>54</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014, h.201-202.

<sup>55</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 29.

<sup>56</sup> J. Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001. H. 135.

berhubungan pihak Balai Besar POM yang berlandaskan tujuan penelitian. Data yang digali melalui wawancara yaitu sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, produk makanan yang diawasi oleh BPOM, Instansi yang bekerja sama dengan BPOM, serta pelaksanaan pengawasan oleh BPOM di lapangan.

## 2. Observasi

Margono mengemukakan bahwa dalam teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap peranan obyek yang diteliti.<sup>57</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di lokasi penelitian, mempelajari, mencatat data yang diperoleh, data primer yang diperoleh dari Balai Besar POM Palangka Raya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi.<sup>58</sup> Melalui teknik ini peneliti berusaha untuk memperoleh data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau tulisan simbolik yang memiliki relevansi dengan penelitian sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

Melalui tahap ini penulis mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan misalnya

---

<sup>57</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 158-159.

<sup>58</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*..., h. 213.

adalah mengabdikan potret selama proses pengumpulan data, Profil BPOM kota Palangka Raya, data produk makanan yang ditarik.

#### **E. Pengabsahan Data**

Keabsahan data ialah terjadinya semua yang telah diamati dan ditulis oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi. Untuk menjamin bahwa data yang dihimpun ini benar atau valid, maka diperlukan pengkajian terhadap sumber data dengan teknik data *Triangulasi*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lexy Moeleong. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang diluar data ini untuk keperluan pengecekan data atau sebagai sumber perbandingan terhadap data tersebut.<sup>59</sup>

Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Adapun yang dimaksud dengan triangulasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam mendeskripsikan tentang peran BPOM dalam mengawasi peredaran produk makanan berbahaya di Kota Palangka raya peneliti memerlukan data yang jelas untuk keakuratan data yang akan diperoleh. Hal ini dapat ditempuh dengan membandingkan hasil

---

<sup>59</sup> J. Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.,h. 178

pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada BPOM dan pelaku usaha.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>60</sup>

Untuk lebih terarahnya data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisis data. Berdasarkan beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data. Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadinya apa yang harus dilakukan.
3. Penarikan Kesimpulan/*Verifikasi*. Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan *verifikasi* dari data-data yang peneliti dapatkan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h, 89.

<sup>61</sup> Agustina Susilawati, *Penerapan Metode One Say One Ayat Pada Santri Dalam Menghafal al-Quran di Rumah Tahfidz al-Wafa Palangka Raya*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2013.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Palangka Raya dan BPOM**

##### **1. Gambaran Kota Palangka Raya**

Kota Palangka Raya secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957, dengan kondisi fisik kota yang belum ada hanya berupa kampung yaitu Kampung Pahandut, terletak di tepi Sungai Kahayan. Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113030'-114004' Bujur Timur dan 1030'-2030' Lintang Selatan. Secara administrasi Kota Palangka raya berbatasan dengan beberapa Kabupaten, yaitu: Kota Palangka Raya di sebelah utara dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Mas. Sebelah selatan kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.<sup>62</sup>

Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha). Kota Palangka Raya merupakan wilayah yang sangat luas untuk wilayah suatu kota. Sehingga selain wilayah perkotaan yang terletak di pusat kota, wilayah pedesaan sangat mendominasi Kota Palangka Raya. Pelaksanaan otonomi Daerah sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>62</sup> Palangka Raya, "Gambaran Umum Kota Palangka Raya", diakses dari: <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>, pada hari: Jumat tanggal 14 April pukul 15.00 wib.



Pemerintahan Daerah, memberikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kota beserta masyarakatnya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, baik dalam bidang urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Sebagai implikasi dari otonomi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2002 wilayah administrasi Kota Palangka Raya telah dilakukan pemekaran jumlah kecamatan dan jumlah kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut secara administrasi Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 kecamatan dan 30 kelurahan, yaitu Kecamatan Pahandut dengan 6 kelurahan; Kecamatan Sebangau dengan 6 kelurahan; Kecamatan Jekan Raya dengan 4 kelurahan; Kecamatan Bukit Batu dengan 7 desa/kelurahan; dan Kecamatan Rakumpit dengan 7 desa/kelurahan. Adapun masing-masing Ibukota Kecamatan di wilayah Kota Palangka Raya adalah Kecamatan Pahandut dengan Ibu kotanya Pahandut, Kecamatan Jekan Raya Ibukotanya Palangka, Kecamatan Sebangau Ibukotanya Kalampangan, Kecamatan Bukit Batu Ibukotanya Tangkiling, dan Kecamatan Rakumpit Ibukotanya Mungku Baru.<sup>63</sup>

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 30 Kelurahan dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pahandut: Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai,

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.

- b. Kecamatan Jekan Raya: Terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu 43 Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau: Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu: Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit: Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.<sup>64</sup>

Sedangkan, jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2015 berjumlah 259.865 jiwa, terdiri atas 132.980 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 126.885 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adakah kecamatan Jekan Raya

---

<sup>64</sup>*Ibid.*,

(135.129 jiwa) dan kecamatan dengan jumlah penduduk sedikit adalah kecamatan rakumpit (3.331 jiwa).<sup>65</sup>

## 2. Gambaran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

### a. Sejarah Berdirinya Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "*range*" yang sangat luas.

Adanya dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong

---

<sup>65</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Statistik Kependudukan Kota Palangka Raya 2015*, Palangka raya: Badan pusat Statistik Kota palangka Raya, 2015, h. 6.

konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

b. Tugas dan Fungsi Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM yang telah dilakukan perubahan dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004, Balai Besar/Balai POM

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Balai POM di Palangka Raya selaku salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- 5) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- 6) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- 7) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.

9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

10) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Visi dan Misi BPOM

Program dan kegiatan Balai POM di Palangka Raya mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Badan POM sebagai lembaga induk. Untuk mengakomodasikan berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan obat dan makanan dan sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang memerlukan perubahan arah, cita-cita organisasi maupun rencana pengawasan obat dan makanan, telah dilakukan pembaharuan Visi dan Misi Badan POM yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor: HK.04.01.21.11.10.10509 tanggal 03 November 2010 tentang Penetapan Visi dan Misi Badan POM, yaitu sebagai berikut :

1) Visi :

Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel dan Diakui Secara Internasional untuk Melindungi Masyarakat.

2) Misi :

a) Melakukan Pengawasan Pre Market dan Post Market Berstandar Internasional.

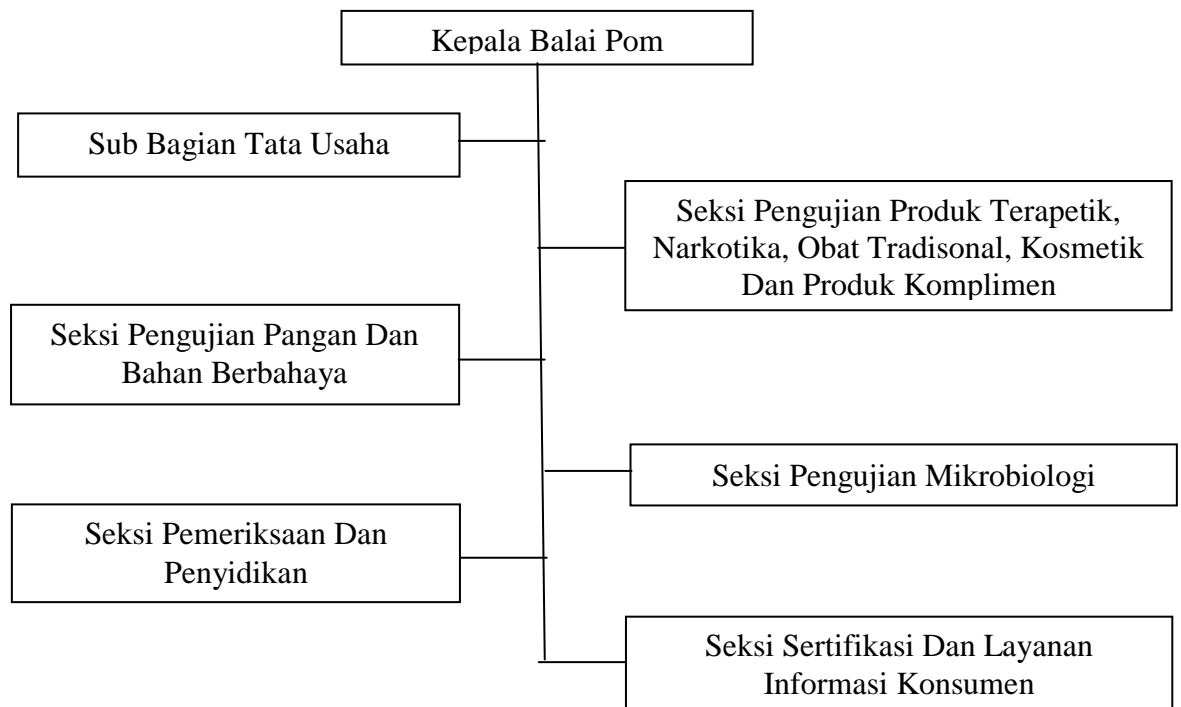
b) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Secara Konsisten.

c) Mengoptimalkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Berbagai Lini.

d) Memberdayakan Masyarakat Agar Mampu Melindungi Diri dari Obat dan Makanan yang Berisiko Terhadap Kesehatan.

e) Membangun Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*).<sup>66</sup>

d. Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya.



Dari struktur diatas, maka pembagian tugas/peran, sebagai berikut:

1) Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan bertugas:

<sup>66</sup>Balai Pengawas Obat dan Makanan, "BPOM",.

- a) Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi (pangan).
- 2) Seksi pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya bertugas:
  - a) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk pangan dan bahan berbahaya.
- 3) Seksi pengujian mikrobiologi bertugas, sbb:
  - a) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- 4) Seksi sertifikasi dan layanan informasi konsumen bertugas sbb:
  - a) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi, dan sarana distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala Bdan POM.
  - b) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.<sup>67</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Produk makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya**

Balai POM sebagai Lembaga Pemerintah *NonDepartement* mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan

---

<sup>67</sup>Dokumentasi Balai POM



terhadap peredaran obat dan makanan baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen itu sendiri dan keluarganya.

Konsumen yang memutuskan akan membeli dan menggunakan produk makanan tersebut tentunya akan mempertimbangkan apakah produk makanan telah memiliki izin edar di BPOM dan makanan yang akan di konsumsi aman dari kandungan yang berbahaya hal ini di karenakan aman atau tidaknya suatu produk makanan yang dikonsumsi akan berdampak besar bagi kelangsungan dan kesehatan hidup konsumen. Untuk itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan 2 subjek dari BPOM terkait Peranan Balai Pengawas Obat Dan Makanan dalam mengawasi peredaran produk makanan di Kota Palangka Raya. Adapun pertanyaan dan hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini.

a) Subjek dari Balai POM

1) Subjek BPOM 1

Nama : GT

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan  
Sertifikat, dan Layanan Informasi  
Konsumen Balai Pengawas Obat dan  
Makanan Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Cilik Riwut km 3,5 No. 13

Berdasarkan hasil observasi dengan Bapak GT dapat peneliti ketahui bahwa beliau memiliki karakter yang berwibawa, ramah, dan cerdas. Beliau sangat lugas dan baik dalam menyampaikan peran BPOM sebagai pengawas secara luas dan terkait pertanyaan dari peneliti berikan sehingga peneliti sangat puas dan senang dengan hasil wawancara tersebut.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak GT dari BPOM terkait bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap peredaran produk makanan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak GT sebagai berikut.

Penuturan subjek BPOM 1:

“BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan untuk mencegah adanya peredaran obat dan makanan berbahaya melalui 2 tahap pengawasan yaitu pertama, pengawasan *Pre Market*. *Pre Market Control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk makanan diedarkan, antara lain standardisasi, pembinaan dan audit cara produksi pangan yang baik serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum produk makanan diedarkan. Tahap kedua, *Post Market Control* adalah pengawasan yang dilakukan

setelah produk makanan diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk produk makanan, peredaran produk makanan, penilaian dan pengawasan iklan atau promosi, monitoring efek samping produk makanan serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan *public warning*”<sup>68</sup>

Kemudian pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada Bapak GT terkait dengan barang atau pangan apa saja yang diawasi peredarannya oleh BPOM kota Palangka Raya.

Penuturan subjek BPOM 1 Bapak GT:

“Pengawasan oleh BPOM terhadap peredaran produk pangan dilakukan secara keseluruhan, meliputi semua produk makanan baik produk makanan kaleng, produk minyak makan nabati dan hewani, produk tepung terigu, roti, gula, mie, mihun, kecap, tempe, tahu, krupuk, bumbu masak/penyedap masakan. Sedangkan, industri minuman yang diawasi baik produk air mineral, es krim, susu, sirup, minuman ringan, dll.”<sup>69</sup>

Kemudian pertanyaan tidak berhenti disitu saja, peneliti kembali menanyakan kepada Bapak GT terkait apakah BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam mengawasi peredaran produk makanan di Kota palangka Raya? Adapun jawabannya sebagai berikut.

Penuturan subjek BPOM 1 Bapak GT :

“Ya tentu saja, BPOM dalam menjalankan tugas tidak sendirian. Akan tetapi, bekerjasama dengan pihak lainnya, antara lain: dari pemerintah ada dari Dinkes

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Gusti Tamjidillah selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2017

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Gusti Tamjidillah selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2017

pada saat pengawasan *Pre Market* yaitu sebelum produk beredar di pasaran. Dimana produk makanan sebelum beredar di masyarakat harus terlebih dulu mendaftarkan produknya, baik melalui BPOM atau Dinkes, dengan cara melaksanakan persyaratan administrasi, persyaratan mutu, dan lainnya. Kalau sudah mendapatkan ijin baru yang dimana dalam tahap ini disebut *Post-Market*. Baru BPOM akan melakukan pengawasan dilapangan. Biasanya bagian PEMDIK SERLIK atau Seksi Pemeriksaan, Penyidikan Sertifikat, dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya yang melakukan bagian inpeksi. BPOM tidak hanya akan melakukan tugas pengawasan tetapi juga pembinaan dan penyuluhan. Seperti apa saja makanan yang tidak boleh beredar, bahan makanan yang tidak boleh digunakan, tata cara pemasaran baik, standarisasi kemasan, dll, terkait temuan pelanggaran BPOM bekerjasama dengan kepolisian. Selain itu, semua lapisan masyarakat baik distributor dan produsen juga ikut berkontribusi dalam melakukan pengawasan.”<sup>70</sup>

## 2) Subjek BPOM 2

Nama : AR

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Staf Pemeriksaan, Penyidikan Sertifikat,  
dan Layanan Informasi Konsumen Balai  
Pengawas Obat dan Makanan Kota  
Palangka Raya

Berdasarkan hasil observasi dengan Ibu AR dapat peneliti ketahui bahwa Ibu AR menjabat sebagai Staf Pemeriksaan, Penyidikan, sertifikat, dan Layanan Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya.

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Gusti Tamjidillah selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2017.

Menurut peneliti, Ibu AR sangat baik dan memiliki pengetahuan yang luas karena bersedia disela waktu bekerja dan mampu memberikan jawaban yang memuaskan saat dilakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Aini Rahmawati dari BPOM terkait bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap peredaran produk makanan.

Penuturan subjek BPOM 2 Ibu AR :

“Balai POM Palangka Raya dalam melakukan pengawasan dengan 2 cara: pertama *Pre Market*, artinya sebelum diberikan ijin edar ada pemeriksaan terlebih dahulu terkait dengan semua fasilitas yang memenuhi persyaratan tersebut. Misalnya, dengan memeriksa sarana dan prasarana produksi yang digunakan. Setelah produsen mendapatkan nomor registrasi baru boleh memproduksi dan mengedarkan produk makanan tersebut; Sedangkan *Post Market*, artinya pemeriksaan dilakukan setelah perusahaan tersebut mendapatkan ijin edar. Pengawasan ini dilakukan dengan cara melakukan uji sampling produk makanan yang beredar di pasaran. Produk makanan tersebut bisa dibeli di toko atau pasar dan bisa dibeli langsung di pabriknya. Selain itu juga pemeriksaan ke sarana produksi dan distribusi.”<sup>71</sup>

Kemudian pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada Ibu AR terkait dengan barang atau pangan apa saja yang diawasi peredarannya oleh BPOM kota Palangka Raya. Penuturan subjek BPOM 2 Ibu AR:

“Balai POM melakukan pemeriksaan ke semua produk makanan secara keseluruhan baik produk makanan dalam kemasan, pangan dari industri rumah tangga

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aini Rahmawati selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 19 Mei 2017.

seperti roti, kue, susu, minyak, tahu, tempe, jajanan anak, air minum, bumbu masak. Pokoknya semua produk makanan yang dijual oleh produsen maupun distributor. Selain itu, produk makanan yang ada di swalayan-swalayan, toko, pasar, termasuk produk yang diawasi oleh BPOM juga.”<sup>72</sup>

Kemudian pertanyaan tidak berhenti disitu saja, peneliti kembali menanyakan kepada Ibu AR terkait apakah BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam mengawasi peredaran produk makanan di Kota Palangka Raya? Adapun jawabannya sebagai berikut.

Penuturan subjek BPOM 2 Ibu AR :

“BPOM di Palangka Raya dalam pelaksanaan pengawasannya melakukan kerja sama dengan lintas sektor antara lain: dinas kesehatan provinsi, Kabupaten/Kota, dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas/Badan Ketahanan Pangan, Aparat Penegak Hukum, serta Instansi Lain yang terkait sesuai keterkaitan produk.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bpk. GT dan Ibu AR dapat diketahui bahwa BPOM menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas menerapkan 2 sistem pengawasan, yaitu: pengawasan Pre Market merupakan pengawasan sebelum barang beredar dimasyarakat yaitu semua pelaku usaha/distributor yang melakukan penjualan akan produk makanan harus melakukan pendaftaran ijin di Balai POM yang mana BPOM akan melakukan uji kelayakan sarana produksi makanan,

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aini Rahmawati selaku staf Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 19 Mei 2017.

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aini Rahmawati selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 19 Mei 2017.

Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, proses dan bahan. Pemeriksaan ini sering disebut dengan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPBB) apabila pemeriksaan telah selesai dan hasil pemeriksaan telah layak dan aman, maka Balai POM dapat memberikan ijin edar berupa dikeluarkannya kode makanan baik Dalam Negeri (MD) maupun Luar Negeri (ML), terakhir produsen dapat mengedarkan produk makanannya dimasyarakat.

Selanjutnya, pengawasan *Post Market* adalah terkait masa setelah produk memiliki ijin edar MD/ML dan diedarkan di masyarakat. Ijin Edar PIRT, ML, MD dan SP terletak pada perbedaan skala produksi, yaitu PIRT ditujukan untuk industri skala rumahan, kecuali produk susu dan olahannya; daging; produk yang membutuhkan penyimpanan beku dan makanan kaleng. Sementara itu, MD ditujukan untuk industri skala besar yang memproduksi sendiri produknya di Indonesia. Sedangkan, ML ditujukan untuk industri skala besar produk impor atau dari luar negeri, baik yang diimpor langsung maupun dikemas ulang di Indonesia. Terakhir, SP adalah Sertifikat Penyuluhan yang diberikan Dinkes untuk pengusaha kecil dengan modal terbatas. Jadi, produk dengan nomor PIRT atau nomor SP. Sama artinya telah memiliki ijin edar BPOM.

Teknis pengawasan peredaran produk pangan olahan baik dalam negeri maupun impor tidak ada perbedaan, keduanya memiliki teknis pengawasan peredaran produk pangan yang sama. Peredaran produk

dilakukan pengawasan tersebut dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan yaitu melalui pemeriksaan/inpeksi sarana di lapangan, baik di sarana produksi maupun sarana distribusi serta pemantauan *farmakovigilan* dan pengawasan label/penandaan dan iklan.

Pengawasan *Post Market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/ Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/ perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (PosPOM).Selanjutnya dilakukan *sampling*pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.

Jadi, dalam *Post Market* ini di lakukan secara rutin oleh Balai POM dengan wujud nyata melakukan *sampling* ke pasar, toko, warung, dan supermaket. Petugas memeriksa labelnya, apakah baik atau tidak, apakah ada rusak/cacat pada kemasannya, ada ijin edar atau tidak di tandai dengan kode PIRT, ML atau MD, dan SP, memiliki kode produksi atau tidak, serta untuk pangan olahan impor labelnya harus bertuliskan Bahasa Indonesia. Luasnya cakupan sarana produksi



sehingga di Kota Palangka Raya masih tidak terdata secara riil. Adapun untuk sarana distribusi produk pangan di Kota Palangka Raya yang dilakukan pengawasan oleh Balai POM dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. 4**  
***Department Store/ Swalayan***  
**Kota Palangka Raya**

<b>No</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kepemilikan</b>
1.	Alfamart	18	Swasta
2.	Barata Dept Store	1	Kerjasama
3.	Citra Raya	1	Swasta
4.	Foodmart	18	Swasta
5.	Hypermart	1	Swasta
6.	Indomart	13	Swasta
7.	KPD	2	Swasta
8.	Mega mart	1	Swasta
9.	Palangka Mall	1	Kerjasama
10.	Sendy's swalayan	2	Swasta
11.	Talens	1	Swasta
12.	Telaga Biru	1	Swasta
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	

(Sumber : Profil Swalayan kota Palangka Raya, 2017)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa supermarket atau swalayan di kota Palangka Raya berjumlah 62 dengan terdiri dari 18 Alfamart, 1 Barata Dept Store, 1 Citra Raya, 18 Foodmart, 1 Hypermart, 13 Indomart, 2 KPD, 1 Mega mart, 1 Palangka Mall, 2 Sendy's swalayan, 1 Talens, 1 Telaga Biru.

**Tabel. 5**  
**Pasar Tradisional Kota Palangka Raya**

<b>No</b>	<b>Alamat</b>	<b>Alamat</b>
1.	Komplek Pasar Kahayan	Jalan Cilik Riwut
2.	Pasar Blauran	Jalan Halmahera
3.	Pasar Subuh	Jalan Lombok
4.	Komplek Pasar Besar Palangka Raya	Jalan Halmahera
5.	Pasar Tradisional Rajawali	Jalan Rajawali
6.	Pasar Jumput	Jalan S. Parman
7.	Pasar Batu Kencan	Jalan Sumatera

(Sumber : Profil Pasar Palangka Raya, 2017)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pasar Tradisional di kota Palangka Raya berjumlah 7 yang terdiri dari Komplek Pasar Kahayan, Pasar Blauran, Pasar Subuh, Komplek Pasar Besar Palangka Raya, Pasar Tradisional Rajawali, Pasar Jumput, serta Pasar Batu Kencan. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu AR data tersebut bulan data riil jumlah distribusi yang ada di Kota Palangka Raya, melainkan data hasil inspeksi yang dilakukan. Karena sarana distribusi produk makanan ada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta beberapa sarana distribusi tidak memiliki izin dalam mendirikan usahanya sehingga BPOM tidak memiliki data riil mengenai jumlah sarana distribusi di kota Palangka Raya.

Sedangkan, untuk produk makanan/ barang yang diawasi peredarannya oleh BPOM kota Palangka Raya sebagai berikut:

**Tabel. 6**  
**Produk Makanan Yang Diawasi Oleh BPOM**  
**Kota Palangka Raya**

No	Produk Makanan	Produk Minuman
1.	Produk makanan kaleng atau dalam kemasan	Produk air minuman atau mineral
2.	Produk minyak makan baik nabati maupun hewani	Produk es krim
3.	Produk kecap, saos, tempe, tahu, dan krupuk	Produk minuman ringan
4.	Produk bumbu masak/penyedap masakan	Produk minuman keras atau alkohol
5.	Jajanan anak	Produk susu, sirup,
6.	Produk mie, spaghetti, mihun, soun, macaroni.	Produk jamu
7.	Produk tepung, roti, kue, gula, manisan.	Produk minuman olahan lainnya

(Sumber : Balai POM Kota Palangka Raya, 2017)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa BPOM melakukan pengawasan produk makanan maupun minuman, seperti: produk makanan kaleng atau dalam kemasan, produk minyak makan baik nabati maupun hewani, produk kecap, saos, tempe, tahu, dan krupuk, produk bumbu masak/penyedap masakan, jajanan anak. Sedangkan, untuk produk minuman, seperti: Produk air minuman atau mineral Produk es krim, Produk minuman ringan, dll.

Berdasarkan penjelasan di atas juga dapat diketahui bahwa BPOM melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap produk makanan yang didagangkan. Pada pemeriksaan, jika ditemukan produk makanan seperti tanpa label halal, tidak sesuai dengan mutu kesehatan dan aman, barang-barang yang kemasannya penyok atau rusak,

kadaluarsa, dll maka BPOM akan menindak langsung dengan melakukan pemberian peringatan kepada pemilik sarana produksi dan sarana distribusi hingga melakukan penyitaan produk makanan yang diduga berbahaya atau di larang. Adapun, produk makanan yang telah ditarik ijin edarnya oleh BPOM sebagai berikut:

**Tabel. 7**  
**Produk Makanan dan Minuman yang Ditarik**

No	Produk Makanan	No Registrasi
1.	Sosis Ayam (Chicken Frankfurter)	ML 239731079173
2.	Koktil Buah Dalam Sirup Kental (Fruit Cocktail In Syrup)	ML 517709100137
3.	Bumbu Kari Pedas (Curry Powder Hot)	ML 255609065104
4.	Naget Ayam Tempura	ML 239731075173
5.	Keripik Kentang Rasa Asin ( Lightly Salted Kettle Cooked Potato Chips )	ML 272809031180
6.	Keripik Kentang Rasa Barbeque ( Barbeque Kettle Cooked Chips )	ML 272809027180
7.	Mi Instan (Yeul Ramen)	ML 231509284014
8.	Mi Instan Rasa Kimchi (Kimchi Ramen)	ML 231509448014
9.	Mi Instan U-dong (Pojang Macha U-Dong)	ML 231509497014
10.	Keripik Kentang (Chesapeake Crab Kettle Cooked Potato Chips)	ML 272809038180
11.	Cokelat Susu Rasa Kopi CV CITRA BOGA PARAMITRA	ML 824031080173

(Sumber : Badan POM, 2017)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengawasan dan penindakan oleh BPOM yaitu menarik dan membatalkan ijin edar

produk makanan berjumlah 11, antara lain: Sosis Ayam (Chicken Frankfurter), Koktil Buah Dalam Sirup Kental (Fruit Cocktail In Syrup), Bumbu Kari Pedas (Curry Powder Hot) Keripik Kentang Rasa Barbeque ( Barbeque Kettle Cooked Chips ), Mi Instan (Yeul Ramen), Mi Instan Rasa Kimchi (Kimchi Ramen).

Berbagai upaya telah dilakukan BPOM untuk meminimalkan peredaran pangan yang tidak memenuhi syarat, antara lain melalui pengawasan yang lebih ketat di pintu masuk/perbatasan, pengawasan lebih difokuskan pada temuan besar dan ke hulu, penguatan peran pelaku usaha dalam mengawasi produknya penanganan produk sesuai cara ritel yang baik dan cara distribusi yang baik serta pengawasan pangan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan lintas sektor di sepanjang rantai pasokan.

Sesuai visi Balai POM agar obat dan makanan terjamin aman, bermutu, dan berkhasiat, juga sesuai misi Balai POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai POM dalam melaksanakan perannya sebagai pengawasan peredaran makanan tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa adanya bantuan dan kerja sama dengan instansi lain.

Penjelasan yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami bahwa dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM tentu saja melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan

sebagainya, antara lain adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas/Badan Ketahanan Pangan, Aparat Penegak Hukum, juga tidak kalah pentingnya adalah berkerja sama dengan masyarakat sebagai konsumen sebagai upaya pengawasan dan kerjasama yang telah dilakukan oleh BPOM di Palangka Raya untuk melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman dan layak untuk dikonsumsi.

## **2. Pelaksanaan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Ekonomi yang Mengedarkan Produk Makanan Berbahaya di Palangka Raya**

Pelaksanaan pengawasan pangan yang dilakukan oleh BPOM merupakan tindakan atau kegiatan pengaturan wajib untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produksi pangan aman, layak, dan sesuai untuk dikonsumsi manusia serta memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Untuk itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan 2 subjek dari BPOM terkait Pelaksanaan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya di Palangka Raya. Adapun pertanyaan dan hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini.

### **a) Subjek dari Balai POM**

#### **1) Subjek BPOM 1**

Nama : GT

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan  
Sertifikat, dan Layanan Informasi  
Konsumen Balai Pengawas Obat dan  
Makanan Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Cilik Riwut km 3,5 No. 13

Subjek BPOM 1 adalah Bpk. GT yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan Sertifikat, dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya. Setelah menanyakan mengenai peranan BPOM dalam pengawasan peredaran produk makanan. Peneliti kembali melakukan wawancara lebih jauh dengan Bapak GT terkait bagaimana pelaksanaan waktu pengawasan pangan yang dilakukan oleh BPOM.

Penuturan subjek BPOM 1 Bapak GT:

“Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Kota Palangka Raya tersebut berjalan secara rutin. Setiap bulan BPOM Kota Palangka Raya melakukan pemeriksaan ke toko atau pasar dan pabriknya sendiri. Pengawasan tersebut dilakukan secara keseluruhan, meliputi semua produk makanan, minuman, obat-obatan yang termasuk ke dalam PIRT, Apotek, Klinik, SP dan lain-lain. Pengawasan yang dilakukan di swalayan juga termasuk pengawasan ke produk makanan, karena semua produk diperiksa secara keseluruhan”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Gusti Tamjidillah selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2017

Kemudian pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada Bapak GT terkait dengan apakah BPOM dalam melaksanakan pengawasan menghadapi kendala atau hambatan. Adapun jawaban dari Bapak GT sebagai berikut.

Penuturan subjek BPOM 1 Bapak GT:

“Kendala yang dihadapi Balai Besar POM ada dua, yaitu: kendala internal dan kendala eksternal. Di mana kendala internal berasal dari dalam Balai Besar POM Palangka Raya. Kendala internal yang dihadapi Balai Besar POM Palangka Raya adalah tentang keterbatasan personil pengawas dan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Balai Besar POM Palangka Raya. Sedangkan kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari pelaku usaha dan masyarakat.”<sup>75</sup>

Setelah mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh BPOM. Peneliti menanyakan bagaimana Balai POM kota palangka Raya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan pangan. Adapun jawaban dari Bapak GT sebagai berikut.

Penuturan subjek BPOM 1 Bapak GT:

“Pengawasan Obat dan Makanan yang tidak berjalan optimal dikarenakan adanya keterbatasan personil BPOM, sehingga dalam hal ini dibutuhkan kepedulian dan dukungan dari segenap komponen bangsa. Karena itulah untuk mengatasi permasalahan tersebut BPOM melakukan kerjasama/kemitraan dengan berbagai instansi terkait. Terakhir. Balai POM kota Palangka Raya berusaha mengantisipasi masalah kepatuhan pelaku usaha dan tingkat pengetahuan konsumen yang masih rendah dengan cara melakukan sosialisasi/ penyuluhan baik kepada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha, serta distributor. Balai POM di Palangka Raya

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Gusti Tamjidillah selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2017.



melaksanakan sosialisasi berupa penyebaran informasi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, pemberdayaan masyarakat sebanyak 5 kali dalam 1 tahun, penyebaran informasi melalui media cetak sebanyak 6 kali dalam 1 tahun, penyebaran melalui pameran sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) sebanyak 10 kali dalam 1 tahun, komunikasi, informasi dan edukasi untuk komunitas sekolah sebanyak 14 kali dalam setahun, penyuluhan komunitas pasar sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, serta Bimtek komunitas desa sebanyak 15 kali dalam 1 tahun”<sup>76</sup>

Kemudian pertanyaan berlanjut kepada Bapak GT terkait dengan apa saja tindakan yang dilakukan oleh BPOM saat dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelaku ekonomi yang melakukan suatu pelanggaran.

“Jika ada perusahaan/pelaku usaha yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi administratif berupa, peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi; pembekuan dan/atau pembatalan Surat Persetujuan; penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan. Selain dapat dikenai sanksi administratif dapat pula dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>77</sup>

## 2) Subjek BPOM 2

Nama : AR

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Staf Pemeriksaan, Penyidikan Sertifikat,  
dan Layanan Informasi Konsumen Balai

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Gusti Tamjidillah selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2017.

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Gusti Tamjidillah selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 20 Mei 2017.

## Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya

Setelah menanyakan mengenai peranan BPOM dalam pengawasan peredaran produk makanan kepada Ibu AR. Peneliti kembali melakukan wawancara lebih jauh dengan Ibu AR terkait bagaimana pelaksanaan waktu pengawasan pangan yang dilakukan oleh BPOM.

Penuturan subjek BPOM 2 Ibu AR:

“Balai POM melakukan pemeriksaan secara rutin yaitu dilakukan 4-5 kali dalam seminggu baik di Kabupaten dan Kota Palangka Raya. Sedangkan, untuk penyelidikan disesuaikan dengan kasus yang ada.”<sup>78</sup>

Selain itu, peneliti mendapatkan informasi tambahan dari wawancara subyek BPOM 2 yang menyatakan bahwa :

“Selain melakukan pengawasan rutin sepanjang tahun, Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) di seluruh Indonesia juga melakukan intensifikasi pengawasan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru di sarana distribusi.”<sup>79</sup>

Kemudian pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada Ibu AR terkait dengan apakah BPOM dalam melaksanakan pengawasan menghadapi kendala atau hambatan. Adapun jawaban dari Ibu AR sebagai berikut.

Penuturan subjek BPOM 2 Ibu AR :

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aini Rahmawati selaku staf Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 19 Mei 2017.

<sup>79</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aini Rahmawati selaku staf Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 19 Mei 2017

“Ya, Jelas ada kendala seperti: kondisi Geografi, kepatuhan pelaku usaha, serta tingkat pengetahuan konsumen yang masih rendah atas resiko atau dampak peredaran bahan berbahaya yang digunakan dalam pangan beredar dengan bebas.”<sup>80</sup>

Setelah mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh BPOM. Peneliti menanyakan bagaimana Balai POM kota palangka Raya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan pangan. Adapun jawaban dari Ibu AR sebagai berikut.

Penuturan subjek BPOM 2 Ibu AR :

“Adanya keterbatasan pegawai kami untuk melakukan pengawasan dalam hal ini untuk mengatasinya kami melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti: Dinkes, Desperindag, dll. Sedangkan, permasalahan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan ketidaktahuan konsumen maka disini BPOM berusaha mengatasinya dengan memberikan edukasi dan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku usaha tentang perlunya tertib administrasi guna menunjang keamanan dan mutu kualitas produk yang dihasilkan dan mendapat kepastian hukum dalam mengedarkan setiap produk usaha izin edar BPOM. Selain itu, mendorong masyarakat untuk proaktif dalam memonitor produksi dengan memeriksa kelengkapan dan kualitas produk yang dibeli, memantau dan melaporkan produk yang kadaluarsa dan palsu.”<sup>81</sup>

Kemudian pertanyaan berlanjut kepada Ibu AR terkait dengan apa saja tindakan yang dilakukan oleh BPOM yang

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aini Rahmawati selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 19 Mei 2017.

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aini Rahmawati selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 19 Mei 2017

berkaitan untuk melindungi konsumen dari masalah pelaku usaha yang menyalahi etika yang ada.

Penuturan subjek BPOM 2 Ibu AR :

“Jika kita menemukan pelanggaran di sarana produksi ataupun distribusi seringkali kita beri surat peringatan. Kalau untuk produksi kita beri peringatan dan point-point yang harus dilakukan untuk perbaikan, kalau tidak ada perubahan kita tindak ke ranah hukum. Kalau untuk distribusi kita masih beri peringatan berupa pemberitahuan, jika masih tidak ada perubahan kita dapat menyita atau melakukan pemusnahan di tempat. Sanksi yang kita berikan kepada pelaku usaha/distribustor dalam menangani masalah ini dapat diklasifikasikan menjadi sanksi administratif, *publik warning*, *recalling* produk, larangan produksi, *pro justitia*-PPNS Badan POM.”<sup>82</sup>

Untuk memperkuat hasil dari penelitian peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha terkait pengawasan di lapangan yang dilakukan BPOM ke sarana produksi dan sarana distribusi. Wawancara yang dilakukan bermaksud untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan telah melalui prosedur izin edar di BPOM dan pernah dilakukan pengawasan secara langsung ke tempat usaha tersebut. Adapun hasil wawancara dapat diuraikan dibawah ini.

b) Informan dari Pelaku Usaha (PU)

1) Subjek PU 1

Nama : FF

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Staf hypermart Kota palangka Raya

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aini Rahmawati selaku pegawai Balai Pom Pengawasan Obat dan Makanan, tanggal 19 Mei 2017

Alamat : Jalan Yos Sudarso

Berdasarkan hasil observasi dengan FF dapat peneliti ketahui bahwa FF bekerja menjadi staf atau pegawai Hypermart Kota Palangka Raya. Tugas yang dilakukan oleh FF yaitu melakukan pengecekan dan penyimpanan barang di rak sesuai dengan jenis dan merk produk barang. Sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa Hypermart merupakan salah satu sarana distribusi dan pusat pembelanjaan di Kota Palangka Raya yang dilakukan pengawasan atau kontrol oleh BPOM. Sehingga peneliti tertarik untuk menanyakan kepada FF terkait apakah saat membuka usaha di sarana produksi ataupun sarana distribusi telah melakukan izin usaha terlebih dahulu ke BPOM. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

Penuturan informan FF :

“Hypermart sebagai penyedia barang jadi atau distributor tidak mendaftarkan ke BPOM karena sifatnya bukan pembuat suatu produk makanan melainkan menjual produk yang sudah jadi. Kami hanya melakukan izin usaha ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan yang lain saya kurang tahu. Tapi tetap kami beretika baik untuk melakukan pemberitahuan kepada BPOM dan bersedia untuk diperiksa dan diawasi oleh BPOM sewaktu-waktu”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah kah BPOM melakukan pengawasan? Kalau ada waktu apa saja BPOM melakukan pengawasan atau pemeriksaan ke tempat

produksi atau tempat distribusi tersebut. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

“Pernah, waktu pengawasan BPOM setiap tahun seringkali inspeksi mendadak ke hypermart biasanya saat bulan ramadhan, hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Natal, serta peringatan lainnya. Mereka melakukan pengecekan barang satu-satu apabila ditemukan produk makanan tanpa label halal, barang-barang yang kemasannya penyok atau rusak, kedaluarsa maka BPOM akan meminta pihak hypermart untuk menarik dan memberikan peringatan untuk tidak boleh menjualnya lagi atau bahkan BPOM langsung menarik dari peredaran barang tersebut”<sup>83</sup>

Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai apakah BPOM pernah melakukan sosialisasi atau edukasi ke sarana distribusi tersebut.

Adapun penuturan informan FF:

“Ya, tentu saja BPOM pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan di hypermart langsung mengenai keamanan pangan Dan bahan Berbahaya serta Labelisasi Halal. Memang penyuluhan tersebut tidak diwajibkan hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja kepada staf atau pegawai di Hypermart. Kalau ada yang tidak mau ikut penyuluhan juga tidak masalah. Mereka menjelaskan ini lo surat edaran dari pusat mengenai produk makanan yang tidak boleh diedarkan dan mesti ditarik terus produk makanan tidak ada label halal atau memiliki kandungan babi mesti dipisahkan raknya sehingga tidak ditempatkan dirak yang sama dengan yang berlabel halal itu saja yang informasi yang diberikan sama pihak BPOM.”<sup>84</sup>

## 2) Subjek PU 2

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Fatmawati Farida selaku staf Hypermart, tanggal 12 Agustus 2017.

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Fatmawati Farida selaku staf Hypermart, tanggal 12 Agustus 2017.

Nama : A

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Staf PT. Kahayan Niaga Utama

Alamat : Jalan R.T.A Milono

Berdasarkan hasil observasi dengan Bapak A dapat peneliti ketahui bahwa Bapak A adalah pegawai atau staf di PT. Kahayan Niaga Utama yang bergerak dibidang distributor barang jadi dan produk makanan kemasan seperti Kecap, Susu, Minyak, Air Minum isi ulang, dll. Beliau sangat ramah dan baik karena bersedia untuk peneliti wawancara disela waktu yang sibuk. Peneliti menanyakan kepada Bapak A terkait apakah saat membuka usaha di sarana produksi ataupun sarana distribusi telah melakukan ijin usaha terlebih dahulu ke BPOM. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

Penuturan informan Bapak A :

“Kami tidak melakukan ijin ke BPOM karena bukan memproduksi pangan ataupun olahan tapi bergerak dibidang distribusi. Kami hanya melakukan ijin usaha saja ke Dinas Perdagangan.”<sup>85</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah kah BPOM melakukan pengawasan? Kalau ada waktu apa saja BPOM melakukan pengawasan atau pemeriksaan ke tempat produksi atau tempat distribusi tersebut. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Ariyanto selaku staf PT. Kahayan Niaga Utama, tanggal 16 Agustus 2017.

Penuturan informan Bapak A :

“Iya, BPOM pernah berkunjung kesini 1 kali untuk melakukan pengecekan barang distributor di PT. Kahayan Niaga Utama dengan membawa banyak rombongan. Biasanya mereka melakukan pengecekan barang dengan melihat tahun kadaluarsa, kemasan, serta tempat *display* atau gudang disini.”<sup>86</sup>

Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai apakah BPOM pernah melakukan sosialisasi atau edukasi ke sarana distribusi tersebut.

Penuturan informan Bapak A :

“tidak pernah kalo penyuluhan, mungkin sifatnya hanya pemberitahuan ini lo barang tidak boleh atau yang boleh dengan memberikan surat edaran terus tempatnya penyimpanan produk makanan mesti bersih dan tidak lembab seperti itu saja yang saya tahu.”<sup>87</sup>

### 3) Subjek PU 3

Nama : ID

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Penjual Makanan Siap Saji

Alamat : Jalan G.bos 12

Berdasarkan observasi dapat peneliti ketahui bahwa Bpk ID adalah Penjual Makanan Siap Saji, usaha yang beliau selama 7 Tahun. Bapak ID memiliki sifat yang ramah dan baik saat dilakukan wawancara. Bapak ID sehari-hari membuat dan menjualkan makanan jadi seperti: sayur-sayuran, lauk bakar,

---

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Ariyanto selaku staf PT. Kahayan Niaga Utama, tanggal 16 Agustus 2017.

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Ariyanto selaku staf PT. Kahayan Niaga Utama, tanggal 16 Agustus 2017.



serta hidangan makan lainnya. Bapak ID menjual makanan jadi/ olahan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan wawancara dan bermaksud menanyakan terkait apakah saat membuka usaha telah melakukan ijin usaha terlebih dahulu ke BPOM. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

Penuturan informan Bapak ID :

“Disini tidak menggunakan ijin BPOM tetapi hanya menggunakan surat keterangan ijin membuka usaha karena sifatnya usaha rumah tangga biasa tidak skala besar jadi hanya ijin biasa.”<sup>88</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah kah BPOM melakukan pengawasan? Kalau ada waktu apa saja BPOM melakukan pengawasan atau pemeriksaan ke tempat produksi atau tempat distribusi tersebut. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

Penuturan informan Bapak ID :

“Kalau dalam pengawasan BPOM setahu saya selama melakukan usaha disini tidak pernah itupun yang pernah melakukan pengawasan hanya dari Dinkes. Tetapi, saya tidak tahu ada apakah mungkin ada pengawasan dari BPOM atau memang tidak ada karena saya hanya 1 kali sempat dilakukan pengawasan dari Dinkes selebihnya tidak pernah karena kebetulan ketika diadakan pengawasan saya tidak ada ditempat atau usaha sedang tutup.”<sup>89</sup>

Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai apakah BPOM pernah melakukan sosialisasi atau edukasi ke sarana

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan Iwan Dahkan selaku pelaku usaha makanan siap saji, tanggal 3 Oktober 2017.

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Iwan Dahkan selaku pelaku usaha makanan siap saji, tanggal 3 Oktober 2017.

distribusi tersebut? Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

Penuturan informan Bapak ID :

“Tidak ada, kalau dari Dinkes diberikan informasi sepiantas aja seperti makanan kalau bisa ditutup dengan rapat sehingga tidak dihindangi lalat atau binatang lain, kebersihan tolong dijaga. Seperti itu saja”<sup>90</sup>

#### 4) Subjek PU 4

Nama : ICS

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Penjual Air Minum Galon Isi Ulang

Alamat : Jalan G. Obos 12

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak ICS adalah penjual minuman isi ulang. Beliau sangat jujur, baik, dan ramah, tidak ada hal yang ditutupi ataupun kurangi dalam wawancara disela kesibukan melayani pembeli. Sebagaimana yang peneliti ketahui produk minuman isi ulang juga termasuk kedalam pengawasan BPOM sehingga peneliti tertarik untuk menayakan kepada ICS terkait apakah saat membuka usaha di sarana produksi ataupun sarana distribusi telah melakukan ijin usaha terlebih dahulu ke BPOM. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

Penuturan informan ICS :

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Iwan Dahkan selaku pelaku usaha makanan siap saji, tanggal 3 Oktober 2017.

“Kami tidak melakukan ijin usaha ke BPOM, kami hanya melakukan ijin usaha ke Dinas kesehatan karena kebetulan kami bukan pemilik asli tempat usaha ini tapi membeli usaha milik orang lain jadi kami hanya memiliki surat ijin Dinkes dari pemilik yang sebelumnya saja.”<sup>91</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah kah BPOM melakukan pengawasan? Kalau ada waktu apa saja BPOM melakukan pengawasan atau pemeriksaan ke tempat produksi atau tempat distribusi tersebut. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

Penuturan informan ICS :

“Pengawasan tidak pernah dilakukan BPOM ketempat usaha kami ini, kan hanya melakukan ijin usaha ke Dinas kesehatan saja jadi kami hanya memiliki surat ijin yang dikeluarkan dari laboratorium Dinkes itupun surat ijinnya belum kami perpanjang masa aktifnya karena kami belum ada waktu untuk perpanjang dan juga bukan pemilik asli depot air minum ini tapi membeli usaha milik orang lain sehingga tidak tahu prosedurnya yang harus dilakukan seperti apa. Kalau belum pernah dilakukannya pengawasan oleh BPOM ketempat usaha kami ini kemungkinan apakah memang kami harus terlebih dulu melakukan mendaftar ijin ke BPOM baru dilakukannya pengawasan ke tempat kami atau memang depot kami tidak dalam cakupan pengawasan BPOM karena hanya melalui Dinkes. Bahkan, setahu saya dinkes tidak pernah datang atau inpeksi kesini juga.”<sup>92</sup>

Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai apakah BPOM pernah melakukan sosialisasi atau edukasi ke sarana distribusi tersebut.

---

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan Imam Cahaya Saputra selaku Penjual Air Minum Galon Isi Ulang, tanggal 3 Oktober 2017.

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan Imam Cahaya Saputra selaku Penjual Air Minum Galon Isi Ulang, tanggal 3 Oktober 2017.

Penuturan informan ICS :

“Tidak pernah kami mendapatkan penyuluhan dari BPOM.”<sup>93</sup>

5) Subjek PU 5

Nama : N

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pegawai Pabrik Pengolahan Tahu dan Tempe

Alamat : Jalan Merdeka

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Bapak N adalah staf yang sudah lama bekerja di pabrik pengolahan tahu dan tempe. Beliau sangat ramah dan baik karena saat peneliti wawancara. Sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa tempat usaha pengolahan tahu dan tempe termasuk kedalam pengawasan atau pengontrolan oleh BPOM. Sehingga peneliti tertarik untuk menanyakan kepada Bapak N terkait apakah saat membuka usaha di sarana produksi ataupun sarana distribusi telah melakukan ijin usaha terlebih dahulu ke BPOM. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

Penuturan informan Bapak N :

“Kalau surat ijin BPOM kami punya tetapi sudah hilang tidak tahu dimana lagi surat ijinnya. Kami belum melakukan perpanjangan surat tersebut.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Imam Cahaya Saputra selaku Penjual Air Minum Galon Isi Ulang, tanggal 3 Oktober 2017.

<sup>94</sup>Hasil wawancara dengan Narno selaku Pegawai Pabrik Pengolahan Tahu dan Tempe, tanggal 3 Oktober 2017.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah kah BPOM melakukan pengawasan? Kalau ada waktu apa saja BPOM melakukan pengawasan atau pemeriksaan ke tempat produksi atau tempat distribusi tersebut. Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

Penuturan informan Bapak N :

“Tidak pernah BPOM datang untuk melakukan pengawasan/pengontrolan kesini. Kalau yang saya tahu BPOM akan melakukan pengawasan apabila dari masyarakatnya atau pembeli sendiri yang melakukan pengaduan atau adanya keluhan terhadap pengolahan tahu atau tempe yang kami miliki. Lagipula kami telah menggunakan kualitas yang baik dari impor untuk pembuatan tahu dan tempe sehingga hal ini dirasa telah cukup aman untuk masyarakat yang membelinya. Mungkin nanti kami akan memperbarui surat ijin kalau BPOM sendiri datang kesini.”<sup>95</sup>

Selain itu, peneliti juga menanyakan mengenai apakah BPOM pernah melakukan sosialisasi atau edukasi ke sarana distribusi tersebut? Adapun jawaban dari informan sebagai berikut.

Penuturan informan Bapak N :

“Tidak pernah BPOM atau siapapun melakukan penyuluhan atau sosialisasi kesini ya.”<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek BPOM dan informan dapat dilihat bahwa setiap pengawasan atau kontrol

---

<sup>95</sup>Hasil wawancara dengan Narno selaku Pegawai Pabrik Pengolahan Tahu dan Tempe, tanggal 3 Oktober 2017.

<sup>96</sup>Hasil wawancara dengan Narno selaku Pegawai Pabrik Pengolahan Tahu dan Tempe, tanggal 3 Oktober 2017.

implementasi kebijakan harus selalu dilaksanakan secara berkala atau jika perlu dapat bersifat kondisional untuk situasi yang insidental. Begitu pula, penjadwalan yang dilakukan oleh BPOM Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki acuan dalam pelaksanaan pengawasan. Jadwal pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh Balai POM dilapangan baik untuk sarana produksi dan sarana distribusi dilakukan secara rutin yaitu 4-5 kali dalam seminggu baik di Kabupaten dan Kota Palangka Raya.

Sedangkan, laporan terhadap adanya temuan kasus bisa dalam bermacam bentuk, inspeksi yang dilakukan badan POM, pengaduan dari konsumen melalui ULPK (Unit Layanan Perlindungan Konsumen) maupun informasi dari media atau lembaga seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). selain itu, di layanan publik BPOM Palangka Raya konsumen dapat pula melakukan konsultasi mengenai obat, makanan, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, dengan cara datang langsung atau menghubungi sosial media BPOM, serta konsultasi gratis bagi pelaku usaha/produsen yang ingin mendaftarkan produknya ke BPOM. Sedangkan, di daerah juga terdapat Operasi Gabungan yang biasanya dilakukan secara terpadu antara beberapa pihak terkait. Biasanya koordinasinya dilakukan oleh pihak Kepolisian, Pemda, atau juga Dinas Perdagangan yang dimana Operasi Gabungan ini dinamakan Tim Pengawasan Terpadu Pengawasan Makanan Berbahaya (TPTPMB).

Dari hasil wawancara Bapak GT dan Ibu AR tersebut juga dapat diketahui bahwa BPOM tidak hanya melakukan pengawasan secara rutin sepanjang tahun, tetapi juga melakukan intensifikasi pengawasan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru di sarana distribusi yang meliputi toko, pasar tradisional, supermarket, *hypermarket*, serta para pembuat dan/atau penjual parsel. Hal ini dilakukan karena menjelang hari besar tersebut, permintaan terhadap produk pangan olahan sangat meningkat, sehingga kemungkinan terjadi peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat juga meningkat, antara lain pangan ilegal, kedaluwarsa, maupun rusak.

Akan tetapi, penerapan pengawasan belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan pendaftarkan izin usahanya ke BPOM dan tidak memenuhi persyaratan mutu kesehatan dan keamanan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dan lemahnya kontrol pengawasan dari BPOM. Maka dari itu, dibutuhkan peran penting masyarakat dalam melakukan pengawasan yaitu dengan cara melakukan pengaduan kepada BPOM setempat apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan dari pelaku usaha baik permasalahan izin edar dan penggunaan bahan berbahaya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka sinergi kedua peran baik peran pihak internal maupun pihak eksternal sangat dibutuhkan dalam pengawasan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BPOM memiliki kendala dalam pengawasan peredaran produk makanan yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu adanya keterbatasan personil pengawas obat dan makanan padahal BPOM melakukan pengawasan tidak hanya 1 wilayah saja, namun BPOM melakukan pengawasan 1 provinsi yang mencakupi 8 Kabupaten Kota. Selain itu, tidak hanya 1 komoditi yang diawasi BPOM tetapi mengawasi 5 komoditi yaitu kosmetik, obat, obat tradisional, suplemen, dan pangan. Dengan banyaknya jumlah Kabupaten/Kota dan jumlah komoditi yang diawasi BPOM tidak sebanding dengan jumlah SDM yang dimiliki BPOM Kota Palangka Raya. Adapun data SDM Balai POM sebagai berikut:

**Tabel. 8**  
**Profil Pegawai Balai POM**  
**Kota Palangka Raya**

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	Sub Bagian Tata Usaha	14
2.	Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen	5
3.	Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya	10
4.	Seksi Pengujian Mikrobiologi	6
5.	Seksi Pengujian Ternak	15
6.	Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan	12
	<b>Total</b>	<b>62</b>

(Sumber : Balai POM kota Palangka Raya, 2014)

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai BPOM ada 62, dari unit kerja, yaitu: Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 14 orang, Seksi Sertifikat Layanan dan Konsumen sebanyak 5 orang, Seksi



Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya sebanyak 10 orang, Seksi Pengujian Mikrobiologi sebanyak 6 orang, Seksi Pengujian Ternokoko sebanyak 15 orang, serta Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan sebanyak 12 orang. Adapun, kebutuhan SDM Balai POM di Palangka Raya Tahun 2015-2019 berdasarkan analisa beban kerja sebagai berikut.

**Tabel. 9**  
**Kebutuhan SDM Balai POM Tahun 2015-2019**  
**Berdasarkan Analisa Beban Kerja**

No	Unit Kerja	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Standar Kebutuhan ABK Tahun 2013	91	91	91	91	91	91
2.	SDM Tersedia	62	67	67	67	67	67
3.	SDM Pensiun, pindah, dll	1	1	1	1	5	3
4.	Kekurangan SDM	30	26	27	28	33	36

(Sumber : Balai POM kota Palangka Raya, 2014)

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa standar kebutuhan ABK Tahun 2013 dari Tahun 2014 sd. 2019 sebanyak 91 orang, SDM tersedia dari tahun 2014 sd. 2019 67, SDM pensiun, pindah, dll dari Tahun 2014 sd. 2017 sebanyak 1 orang, sedangkan di tahun 2018 dan 2019 sebanyak 5 dan 3 orang. Terakhir, data BPOM kekurangan SDM dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 sebanyak 30, 26, 27, 28, 33, 36 orang. Berdasarkan kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium pegawai selama 5 (tahun) mulai tahun 2015-2019 berarti tidak ada penambahan pegawai selama kurun waktu tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.

Selanjutnya, kendala eksternal yaitu kendala kepatuhan pelaku usaha, serta tingkat pengetahuan konsumen dan produsen yang masih rendah atas resiko dan dampak peredaran bahan berbahaya yang digunakan dalam pangan yang beredar dengan bebas. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku usaha maupun konsumen tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah yang berlatar belakang pendidikan relatif rendah yang mana mereka tidak mengetahui efek jangka panjang dari bahan-bahan yang mereka gunakan untuk memproduksi makanan maupun mengonsumsi makanan yang berbahaya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat dipahami bahwa, solusi dalam mengatasi hambatan atau kendala kepatuhan pelaku usaha dan tingkat pengetahuan konsumen yang masih rendah tersebut ialah BPOM melakukan pemberdayaan serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, edukasi, serta informasi kepada masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha melalui media cetak, media elektronik, serta penyuluhan secara langsung hal ini agar masyarakat memiliki kesadaran mengenai hak dan tanggung jawabnya berkaitan dengan mutu dan keamanan produk baik produk obat maupun makanan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan AR dapat diketahui bahwa dalam upaya menangani kelalaian yang disebabkan oleh pelaku usaha yang menjual produk makanan yang tidak memenuhi syarat atau standar mutu keamanan makanan yang dapat merugikan

konsumen yaitu dengan diberikannya sanksi administratif dan menyita barang-barang yang tak sesuai standar, *publik warning* atau mencantumkan peringatan dan larangan suatu produk makanan melalui website yang dapat diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, *recalling* produk, larangan produksi atau membekukann izin praktik, *pro justitia*-PPNS Badan POM yang merupakan wewenangan Balai POM.

### **C. Analisis Penelitian**

#### **1. Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Produk makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk makanan secara langsung turut berperan dalam melindungi konsumen dari produk makanan yang tidak layak dikonsumsi. Seperti yang telah diuraikan pada kajian teori di BAB II bahwa peran merupakan aspek yang dinamis demi kedudukan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat dalam arti merupakan rangkaian peraturan dalam membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.<sup>97</sup>

Dikaitkan dengan teori peran diatas maka peran BPOM adalah suatu usaha atau tindakan dalam hal ini yang dilakukan oleh BPOM

---

<sup>97</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat...*, h. 225.

dalam rangka mengawasi peredaran produk makanan baik sebelum beredar maupun yang telah beredar di masyarakat, tidak terlepas dari norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan posisinya dalam situasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai peranan BPOM terhadap peredaran produk makanan dengan subjeknya adalah 2 orang pegawai BPOM Kota Palangka Raya sepakat mengatakan bahwa BPOM menerapkan 2 sistem pengawasan sebagai berikut:

- 1) Sistem pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*Pre-Market*) melalui:

Pengawasan *Pre Market* merupakan pengawasan sebelum barang beredar dimasyarakat yaitu pendaftaran izin pangan melalui pengaturan, pengendalian, serta pembinaan dari awal proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum makanan atau pangan tersebut beredar dengan menerapkan standar mutu dan keamanan pangan.

- 2) Sistem pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*Post-Market*) melalui:

Pengawasan *Post Market* adalah terkait masa setelah produk memiliki izin edar yaitu BPOM melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap produk makanan dilakukan dengan cara inspeksi ke sarana produksi dan sarana distribusi.

Pada hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa sistem pengawasan yang diterapkan oleh BPOM telah tepat dan sejalan dengan apa yang disampaikan pada kajian teori di BAB II tentang tugas dan fungsi BPOM Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001, antara lain: pengaturan, regulasi, dan standardisasi, Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB), evaluasi produk sebelum diizinkan beredar, *Post marketing vigilance* termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum, pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk, riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan, serta komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.<sup>98</sup>

Jadi, dikaitkan dengan teori diatas dengan penerapan sistem pengawasan yang dilakukan BPOM bahwa tugas dan peran BPOM tidak lain adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM melakukan pengawasan obat dan makanan sebelum pangan beredar di masyarakat. Produsen atau pelaku usaha harus memperhatikan seluruh aspek rangkaian kegiatan dengan menerapkan CPBB. Bagi produsen atau pelaku usaha yang telah menerapkan CPPB, akan diberikan sertifikat sesuai dengan

---

<sup>98</sup>POM, "BPOM",.

bentuk sediaan yang dibuat dan produk yang telah mendapat sertifikat dapat menjual dan mengedarkan produknya ke pasaran.

Tetapi, disini pihak produsen tetap harus memantau dan mengawasi produk yang sudah beredar di pasaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti, terjadinya kerusakan produk, produk kadaluarsa, dan sebagainya. Inpeksi dilakukan melalui pemeriksaan rutin/khusus, berdasarkan laporan konsumen.

Selanjutnya, BPOM melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap produk makanan dilakukan dengan cara inspeksi ke sarana produksi dan sarana distribusi. Inpeksi dilakukan melalui pemeriksaan rutin/khusus, berdasarkan laporan konsumen. BPOM juga melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. Sehingga apabila ditemukan masalah produk makanan berbahaya, produk kadaluarsa, dan sebagainya dapat dilakukan tindak lanjut berupa teguran atau peringatan hingga dapat ke ranah hukum. Terakhir, memberikan informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik kepada konsumen.

Dari tahapan-tahapan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM tersebut hampir sama dengan Lembaga *Hisbah* sebagaimana mengacu pada kajian teori BAB II mengenai pengawasan dijamin Rasulullah yang dilakukan oleh suatu institusi pengawas pasar yang biasa disebut dengan *hisbah*. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari perilaku yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dalam pasar. Seseorang pengawas pasar (*Muhtāsib*) mempunyai kewenangan untuk menindak para pelaku kejahatan di dalam pasar. Kejahatan tersebut bisa saja berbentuk beberapa kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak mana pun.<sup>99</sup>

Berdasarkan kajian teori *Hisbah* diatas jika dikaitkan dengan pengawasan pasar yang dilakukan Balai POM bahwa pengawasan yang dilakukan oleh *Hisbah* dan BPOM mempunyai persamaan pada tugas dan perannya yaitu mengawasi dari 3 aspek dalam sektor ekonomi yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. *Hisbah* dan Balai POM ini juga menerapkan standar kehalalan, keamanan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas pangan. Selain itu, apabila di dalam pengawasan ditemukan adanya penyimpangan maka BPOM ataupun *Hisbah* memberikan teguran kepada yang melanggar, memberikan nasihat ketika teguran tidak berhasil, memberikan sanksi dengan batasan yang

---

<sup>99</sup>Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syaria...*, h. 213-216.

wajar dan apabila penyimpangan cukup berat maka pelaku kejahatan dapat dibawa ke ranah pidana.

Aturan pengawasan yang dimulai dengan ditunjuknya seseorang untuk mengawasi kegiatan perekonomian yang sedang berjalan oleh pemerintah. Di antara bentuk ketaatan itu adalah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan untuk tidak melakukan penyimpangan atau merugikan orang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>100</sup>  
(QS. An-Nisa’: 59)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada-Nya dan rasul-Nya dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang Sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para *ulil amrī*’ atau pemimpin, mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim dan para ahli fatwa (*mufti*).

<sup>100</sup>Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta, 1990, h. 20.



Selama perkara yang diperintahkan tidak melanggar syariah maka harus ditaati. Apabila ditemukan berlainan atau perselisihan pendapat tentang sesuatu maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan segala perselisihan kepada Allah dan Rasul, yaitu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat diatas jika dikaitkan dengan ketaatan kepada *ulil amrī'* (pemimpin) adalah wajib dilaksanakan selama perkara yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut dalam hal kebaikan, tidak melanggar syariat, dan bukan dalam rangka untuk berbuat maksiat. Ketaatan kepada *ulil amrī'* juga mencakup pada ketaatan terhadap aturan-aturan yang disusun dan ditetapkan oleh *ulil amrī'*.

Jadi, bentuk ketaatan ini berlaku kepada pelaku usaha dalam berbisnis atau melakukan usaha ekonomi agar wajib mentaati dan mengikuti segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah baik mengenai ijin industri pangan maupun produk pangan apa saja yang boleh dan tidak boleh diedarkan kepada masyarakat guna mengusahakan kebaikan bagi masyarakat sebagai konsumen dan bagi pelaku usaha itu sendiri. Apabila pelaku usaha tersebut telah taat dan menjalankan peraturan dari pemerintah selama tidak bermaksiat kepada Allah SWT, sesungguhnya ia telah taat dan patuh kepada Allah SWT.

Mengacu pada kajian teori BAB II tentang *maqāshid syarī'ah*. Dalam memaparkan hakikat *maqāshid syarī'ah*, bahwa dari segi

substansi *maqāshid syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majāzi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>101</sup>

Berdasarkan kajian teori *maqāshid syarī'ah* diatas jika dikaitkan dengan peranan pemimpin atau BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya, yaitu untuk menjaga agama. Agama tidak melarang seseorang meraih materi, hiasan, dan gemerlap duniawi yang banyak sekalipun, karena dengan demikian, ia memperoleh sarana kehidupan bahagia di dunia sekaligus sarana untuk menabung guna kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi, agama melarang seseorang memperoleh materi dengan cara yang tidak sah, antara lain kegiatan yang merugikan bahkan mengancam jiwa orang lain.

Apabila dikaitkan dengan pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya, dalam hal ini dapat menjaga agama si pelaku usaha itu sendiri karena adanya pengawasan dari BPOM menjadikan pelaku usaha tersebut berusaha untuk meraih keuntungan duniawi dengan cara halal dan juga mendapatkan

---

<sup>101</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, h. 69-70.

keuntungan di akhirat karena telah menjalankan perintah agama dan mentaati peraturan dari pemimpin.

Selanjutnya, *maqāshid syarī'ah* untuk menjaga akal, akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan. Dengan akal pula manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Pengawasan oleh BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya ini bagi pelaku usaha dapat menjaga akalnya karena dari pengawasan tersebut pelaku usaha mempelajari produk makanan yang halal dan yang haram, yang berbahaya, dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk, sehingga mereka dapat terhindar dari perilaku tercela dan berusaha untuk mentaati segala peraturan dan menjauhi segala kegiatan bisnis yang merugikan orang lain.

Selain itu, adanya pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan berbahaya bagi konsumen dapat memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan. Konsumen pun merasakan aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka. Selanjutnya, *maqāshid syarī'ah* untuk menjaga jiwa. Agama tidak melarang seseorang meraih materi, hiasan, dan gemerlap duniwi yang banyak sekalipun, karena dengan demikian, ia memperoleh sarana kehidupan bahagia didunia sekaligus sarana untuk menabung guna kebahagiaan di akhirat.

Akan tetapi, agama melarang seseorang memperoleh materi dengan cara yang tidak sah, antara lain kegiatan yang merugikan

bahkan mengancam jiwa orang lain. Oleh karena itu, adanya pengawasan oleh BPOM dari peredaran produk makanan berbahaya dapat menjaga jiwa masyarakat dari perilaku menyimpang pelaku usaha yang menjalankan bisnis tercela demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam berbisnis pelaku usaha hendaknya menjaga keutuhan jiwa seseorang dan jujur dalam melakukan kegiatan usaha agar tidak melakukan penyimpangan dan merugikan orang lain.

Selanjutnya, *maqāshid syarī'ah* untuk menjaga harta, manusia termotivasi untuk mencari harta demi menambah kenikmatan materi dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta tersebut harus dikeluarkan oleh pemiliknya dengan cara membayar zakat dan sedeqah.

Adanya pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh BPOM bertujuan untuk dapat melindungi harta pelaku usaha dari kegiatan berdagang yang menghasilkan harta secara bathil, seperti menipu, mendzolimi orang lain, membuat atau mengolah makanan dengan menggunakan bahan berbahaya. Perbuatan ini adalah haram dan dilarang oleh Islam. Memelihara harta atau kepemilikan harta secara individu merupakan salah satu dari lima unsur kemaslahatan dalam *maqāshid syarī'ah* (tujuan *syarī'ah*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 subjek dari BPOM dapat diketahui bahwa BPOM melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap produk makanan yang didagangkan. Sebagaimana yang diuraikan pada kajian teori BAB II mengenai produk adalah segala suatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Tujuan atau pemakaian produk adalah untuk barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual lagi dan untuk barang yang dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran.<sup>102</sup>

Berdasarkan kajian teori produk diatas jika dikaitkan dengan produk makanan yang diawasi oleh BPOM yaitu produk makanan kaleng atau dalam kemasan, produk minyak makan baik nabati maupun hewani, produk kecap, saos, tempe, tahu, dan krupuk, produk bumbu masak/penyedap masakan, jajanan anak.

Sedangkan, untuk produk minuman, seperti: produk air minuman atau mineral produk es krim, produk minuman ringan, dll. Tidak hanya itu BPOM juga melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang berlabel halal dan tidak berlabel halal. Sebagaimana mengacu pada kajian teori BAB II tentang makanan halal. Suatu makanan dikatakan sebagai makanan halal adalah jika memenuhi syarat halal zatnya yaitu tidak mengandung zat atau makanan yang

---

<sup>102</sup>Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran; Pendekatan Praktis..*, 2008, h. 67.

diharamkan seperti daging babi, bangkai, darah, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, alkohol maupun bahan-bahan lain yang sifatnya haram.dan tidak mengandung najis atau kotoran.<sup>103</sup>

Apabila kajian teori tersebut dikaitkan dengan pemeriksaan dilakukan oleh BPOM jika ditemukan produk makanan yang diawasi tersebut tanpa label halal, tidak sesuai dengan mutu kesehatan dan keamanan, barang-barang yang kemasannya penyok atau rusak, kadaluarsa, dll maka BPOM akan menindak langsung dengan melakukan pemberian peringatan kepada pelaku usaha baik di sarana produksi dan sarana distribusi hingga melakukan penyitaan produk makanan yang diduga berbahaya atau di larang.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM memiliki keterbatasan, maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 2 subjek dari Balai POM berkerja sama dengan instansi lain, seperti:

- 1) Dinas Kesehatan yang turut serta membantu pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM dengan melakukan kontrol terhadap terpenuhinya aspek-aspek kesehatan dari produk makanan olahan dan juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan;

---

<sup>103</sup>Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam...*,

- 2) Dinas Perdagangan turut berperan dalam membantu pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM dengan memberikan regulasi perijinan kepada produsen dan distributor. Selain itu, mekanisme pengawasannya juga dengan melakukan pemeriksaan berkala di lapangan/ tempat produk makanan olahan dalam negeri maupun luar negeri yang diperdagangkan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan hanya sebatas pemeriksaan keadaan fisik dari produk pangan yang beredar di pasaran, seperti pemeriksaan kode registrasi yang terdapat di kemasan produk.
- 3) Badan Ketahanan Pangan turut berperan dalam membantu pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Melakukan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Selain itu, memberikan jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan *suplay* pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, dan sebagainya.
- 4) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen di kota Palangka Raya

maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun fungsi BPSK adalah memberikan kontribusi perlindungan konsumen dan menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran.

Dari uraian diatas peneliti berkesimpulan bahwasanya peran pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ini walaupun telah tepat dan efisien dengan menerapkan 2 bentuk pengawasan yaitu *pre market* dan *post market*, namun tetap saja mestinya peranan ini tidak hanya melekat dan menjadi monopoli Balai POM dan instansi terkait seperti Dinkes, Dinas Perdagangan, BPSK, dll.

Tetapi juga, pemerintah daerah dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Balai POM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.



Satu hal yang tidak kalah penting adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan sangat penting. Masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen cerdas yang teliti sebelum membeli dan mengonsumsi obat dan makanan, dengan mengetahui dan memastikan 5 (Lima) Kunci Keamanan Pangan, yaitu:

- 1). Menjaga kebersihan;
- 2). Pisahkan pangan mentah dari pangan matang;
- 3). Masaklah dengan benar;
- 4). Jagalah pangan pada suhu aman;
- 5). Gunakan air dan bahan baku yang aman.

Selain itu, mengacu pada teori BAB II tentang keamanan pangan maka konsumen sebelum menggunakan suatu produk makanan untuk mengetahui ciri-ciri pangan yang memiliki kemasan baik dengan cara sebagai berikut:

- 1) Kemasan dalam kondisi baik tidak rusak, penyok atau menggembung;
- 2) Pangan tidak kadaluarsa atau rusak;
- 3) Sudah memiliki nomor izin edar: MD (Pangan yang diproduksi dalam negeri) ML (pangan yang diimpor dari luar negeri) PIRT (pangan yang diproduksi oleh rumah tangga).<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan..., h. 1-7.

Berdasarkan kajian teori diatas dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM bahwa pemerintah telah berupaya agar makanan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pengawasan dari proses produksi makanan, peredaran makanan, sampai dengan penggunaan makanan.

Termasuk makanan antara lain, bahan tambahan makanan, kemasan makanan yang baik dan label makanan. Semua produk makanan dan minuman yang dikemas dan menggunakan label, yang dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM, sebelum diedarkan ke pasar. Nomor pendaftaran ini diberikan setelah dilakukan penilaian keamanan pangan, dan dipergunakan oleh Badan POM untuk mengawasi produk yang beredar di pasaran.

Pencantuman keterangan dalam label makanan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dari label makanan dapat diketahui oleh konsumen jenis dan komposisi bahan, sehingga konsumen dapat mengetahui apakah makanan tersebut layak dikonsumsi. Dari label juga dapat diketahui waktu kadaluarsa makanan tersebut, klaim gizi, cara pemakaian/penyajian, peringatan ataupun keterangan lainnya yang sangat diperlukan konsumen.

Selain itu, makanan yang beredar terdiri dari makanan yang dikemas dan yang tidak dikemas. Untuk makanan yang dikemas,

apabila terjadi perubahan kemasan seperti penyok, kembung atau robek/rusak kemasannya atau labelnya rusak, sebaiknya tidak dikonsumsi. Demikian juga untuk makanan yang tidak dikemas dilakukan pemeriksaan bentuk, warna dan bau.

## **2. Pelaksanaan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Ekonomi yang Mengedarkan Produk Makanan Berbahaya di Palangka Raya**

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.<sup>105</sup>

Berdasarkan teori diatas apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Balai POM terhadap pengawasan peredaran produk makanan merupakan pengawasan yang sangat komprehensif (*fullspectrum*) yaitu menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat obat dan makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian obat dan makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian obat dan makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku

---

<sup>105</sup> Ekhaardi, "Pelaksanaan",.

kepentingan. Balai POM di Palangka Raya selaku salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM, menyelenggarakan fungsi dan tugas pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.

Salah satu indikator yang digunakan penulis untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh BPOM sudah tepat sasaran atau tidak dalam menghindari pelaku usaha/ekonomi dari kegiatan usaha yang menyimpang dan merugikan konsumen dengan cara mengetahui waktu BPOM melakukan tindakan pemantauan peredaran pangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa sifat dan waktu pengawasan oleh BPOM sudah berjalan dengan baik karena Balai POM telah memiliki pedoman kerja dan menentukan proses pelaksanaan jadwal rutin dalam melakukan melaksanakan pemeriksaan dan sampling ke sarana produksi maupun sarana distribusi.

Namun demikian, pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan Balai Besar POM di Palangka Raya masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan ketika Balai besar POM Palangka Raya melaksanakan inspeksi mendadak atau pemeriksaan dilokasi usahapasti ada kebocoran informasi, sehingga pelaku usaha dapat mengantisipasi inpeksi mendadak (sidak) atau pemeriksaan dari Balai Besar POM kota Palangka Raya.

Selain itu, pedoman kerja dalam menentukan waktu pengawasan yang dibuat oleh BPOM seringkali tidak sesuai dengan pelaksanaan

pengawasan dilapangan karena faktanya tidak semua sarana produksi dan sarana distribusi mendapatkan pengawasan langsung. Walaupun ada beberapa dilakukan pengawasan, tetapi hanya dilakukan pada waktu tertentu saja seperti hari raya idul fitri, natal, dll. Bahkan adasrana produksi dan sarana distribusi tidak pernah sama sekali dilakukan pengawasan. Hal ini dirasa masih kurang efektif dan efisien untuk menangkal peredaran produk makanan yang tidak aman.

Mengacu pada kajian teori BAB II tentang pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut dan saran yang hendak dicapai. Pengawasan yang baik harus memiliki atau melalui tahapan-tahapan tertentu sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan, serta memiliki waktu-waktu tertentu dalam proses pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.<sup>106</sup>

Berdasarkan kajian teori diatas dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maka sudah selayaknya Balai POM Kota Palangka Raya melaksanakan waktu pengawasan ke sarana produksi dan sarana distribusi lebih aktif dan terarah dengan melakukan pengawasan secara intensif untuk memastikan produk obat dan makanan yang beredar aman, berkhasiat, bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi sesuai dengan salah satu asas perlindungan konsumen yaitu demi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

---

<sup>106</sup>Saputra Gaery Rahman, "*Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)* ..

konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Adanya penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai POM di Palangka Raya mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi hal ini dapat dilihat dengan adanya kendala/hambatan yang dihadapi oleh BPOM dalam melaksanakan peranannya untuk mengawasi peredaran produk makanan baik bersifat internal maupun eksternal, yaitu kendala internal meliputi faktor kondisi geografi dan keterbatasan personil pengawas Balai POM kota Palangka Raya merupakan salah satu faktor penyebab kesulitan Balai POM dalam melakukan pengawasan hal ini disebabkan karena karakteristik Provinsi Kalimantan Tengah yang luas wilayahnya satu setengah kali Pulau Jawa, yaitu mencapai 153.564 km<sup>2</sup> dengan 14 Kabupaten/Kota.

Hal ini yang menjadikan sebuah tantangan bagi BPOM melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif sehingga akan berpengaruh pada intensitas pengawasan yang rendah ataupun lingkup pengawasan produk yang lebih sempit, ditambah keterbatasan staf pengawas Balai POM Palangka Raya, dengan banyaknya jumlah Kabupaten Kota dan jumlah komoditi yang diawasi BPOM tidak sebanding dengan jumlah SDM yang dimiliki BPOM Kota Palangka

Raya menjadikan kinerja Balai POM Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan menjadi tidak maksimal.

Sedangkan, kendala eksternal, meliputi: kepatuhan pelaku usaha yang masih rendah. Pelaku usaha produk makanan belum sepenuhnya patuh pada ketentuan keamanan, mutu, dan label yang ditetapkan oleh BPOM. Padahal kepatuhan pelaku usaha sangat diperlukan demi terjaminnya mutu keamanan dan kesehatan masyarakat. Tingkat pengetahuan konsumen yang masih rendah atas resiko atau dampak peredaran bahan berbahaya yang digunakan dalam pangan beredar dengan bebas.

Menghadapi kendala-kendala diatas Balai POM Kota Palangka Raya sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, langkah-langkah yang bersifat korektif atau upaya strategis yang perlu diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adanya kendala dari keterbatasan staf Balai POM hal ini Balai POM sebagai instansi Pemerintah Non Departemen yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh Pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi tugas kewenangan dan struktur organisasi Balai POM. Jumlah staf ataupun pegawai Balai POM baik di kantor pusat maupun kantor daerah sudah ditentukan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, keterbatasan staf ini dapat diatasi dengan meminta usulan atau pertimbangan penambahan jumlah pegawai ke Pemerintah. Keterbatasan pegawai tidak dapat dianggap sepele karena

ini akan mempengaruhi kinerja Balai POM yang menjadi kurang maksimal dan kurangnya intensitas pengawasan yang dilakukan karena luasnya wilayah kota Palangka Raya yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai Balai POM.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di pusat dan balai melalui pemberian informasi, penyuluhan/komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Balai POM dalam hal ini melakukan sosialisasi dan memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan edukasi tentang Obat dan makanan dalam rangka memerangi peredaran produk Obat dan Makanan berbahaya dan ilegal.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya hanya masyarakat yang dapat menentukan dan memproteksi dirinya dari hal-hal yang merugikan. Sedangkan, pemerintah hanya bersifat membantu masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Balai Besar POM perlu meningkatkan perannya, baik kepada produsen maupun konsumen. pembinaan kepada masyarakat selaku konsumen perlu terus diintensifkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepekaandalan menilai produk-produk yang beredar di pasaran. Sosialisasi tentang bahan-bahan zat berbahaya diharapkan dapat memunculkan daya kritis



masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap produk obat dan makanan yang ada.

Selain itu, mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan melalui pembinaan kepada produsen ditujukan dengan pemberian petunjuk pembuatan obat dan makanan yang baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, produsen mampu membuat produk makanan yang berkhasiat, berkualitas dan bermutu tanpa harus menambah zat-zat berbahaya yang merugikan konsumen.

Sebagai lembaga pengawas, Balai POM di Palangka Raya harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Adanya pembinaan secara berkelanjutan, kedepan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan.

Balai POM di Palangka Raya menghadapi tantangan di era globalisasi sekarang ini masih perlu terus melakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok agar pencapaian kinerja dimasa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BPOM sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Sebagaimana mengacu pada kajian teori BAB II bahwa perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>107</sup>

Berdasarkan kajian teori diatas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Mengacu pada hal tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sehingga diharapkan segala kepentingan konsumen secara *integrative* dan *komprehensif* dapat dilindungi.

Pembangunan perekonomian pada era globalisasi ini harus dapat mendukung, tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan

---

<sup>107</sup>Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

beraneka barang dan/ atau jasa yang sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/ atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Selain itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Dengan demikian dapat terwujud keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Adapun pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan koreksi yang dilakukan Balai POM dalam terhadap pelaku usaha/ekonomi yang melakukan penyimpangan atau menggunakan bahan makanan yang berbahaya, yaitu memberikan peringatan secara tertulis, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Apabila telah dilakukan penarikan produk pangan dari peredaran hal yang selanjutnya, dilakukan pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa kesehatan manusia.

*Recalling* Produk atau penghentian produksi untuk sementara waktu. *Recalling* Produk yaitu larangan mengedarkan untuk sementara

waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia. Untuk makanan yang telah terdaftar dan ditemukan ada bahan tambahan pangan yang berbahaya, maka nomor izin edarnya ditarik. Pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan atau pencabutan izin produksi atau izin usaha,

Selanjutnya, *Public warning* merupakan produk BPOM dalam memberikan informasi mengenai obat dan makanan melalui website BPOM terkait informasi baik mengenai produk apa saja yang memiliki izin edar, produk-produk ilegal, maupun berita seputar kegiatan BPOM diseluruh wilayah Indonesia. BPOM Kota Palangka Raya setelah melakukan pemeriksaan lapangan dan melakukan sampling uji laboratorium.

Pada produk makanan impor yang tidak memiliki izin edar dan kadaluarsa beredar di masyarakat, maka produk makanan tersebut akan ditarik dari pasaran dan selanjutnya akan dimusnahkan oleh BPOM. Selanjutnya BPOM di dalam melakukan penarikan tersebut, maka BPOM mengeluarkan *public warning* (peringatan) yang menyebutkan mengenai produk makanan impor ilegal dan kadaluarsa.

Terkait temuan produk yang diduga berbahaya juga akan dirilis dan dimasukkan kedalam forum *public warning* atau peringatan publik guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait produk yang

beredar dipasaran. Peringatan publik (*Publik Warning*) untuk dapat diketahui oleh masyarakat maka diperlukan sosialisasi mengenai *Publik Warning* kepada masyarakat karena tidak seluruh masyarakat mengetahui adanya peringatan publik (*Publik Warning*) yang dibuat oleh BPOM. Hal ini dilakukan sebagai dasar penegakan hukum sekaligus upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk menjamin hak-hak konsumen.

Dikaji dari implementasi pengawasan Balai Besar POM terhadap tugas pengawasan yang seharusnya dilakukan Balai Besar POM terhadap peredaran makanan dan minuman. Perlindungan konsumen dikatakan efektif apabila hak-hak konsumen seperti yang tertera dalam di dalam bab II dapat terpenuhi. Hak-hak tersebut adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang–undangan lainnya.<sup>108</sup>

Berdasarkan kajian teori diatas dikaitkan dengan konsumen bahwa dalam Islam, konsumen yang mengonsumsi barang dan/atau jasa merupakan manifestasi zikir atas nama Allah SWT, karena batasan-batasan yang diberikan Islam kepada konsumen untuk tidak mengonsumsi barang dan/atau jasa yang haram agar konsumen selamat baik di dunia maupun akhirat.

Bagi seorang muslim, makanan dan minuman erat kaitannya dengan ibadah dan berpengaruh pada ekonomi, karena akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang merugikan serta menyimpang. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pelaku usahatersebut akan menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini akan berdampak pada matinya dunia usaha dan meningkatnya jumlah pengangguran.

Produsen dalam islam berkaitan erat dengan pekerjaan, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mengeluarkan seluruh potensinya untuk mencapai tujuan tertentu. Islam tidak mengatur hak-

---

<sup>108</sup> Abdul rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan...*, h.192-193.

hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan yang curang dan menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapat lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Konsumen Indonesia mayoritas muslim, maka sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas barang dan/atau jasa yang merupakan haknya, bukan malah menjadi korban dari praktik perdagangan yang tidak fair.

Kelebihan dari hak-hak konsumen yaitu dapat menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, dapat menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Selanjutnya, dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;

Mengacu pada hal tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hak-hak konsumen diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen

melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sehingga diharapkan segala kepentingan konsumen secara *integrative* dan *komprehensif* dapat dilindungi.

Akan tetapi, hak-hak konsumen ini memiliki kelemahan dan kekurangan yaitu hanya berlaku terhadap subjek yang berdomisili di Indonesia. Padahal kenyataannya, liberalisasi perdagangan dan ekonomi melahirkan konsekuensi berupa aktivitas bisnis dan ekonomi yang dapat diselenggarakan melalui jarak jauh antar negara dan benua. Sehingga aktivitas bisnis semacam ini memungkinkan konsumen melakukan transaksi dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, sosial media, telepon, dan *fax*.

Transaksi elektronik jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi seperti internet, media sosial, telepon dan *fax* terbukti menimbulkan masalah baru terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban konsumen. Persoalan mulai muncul ketika konsumen melakukan pembelian barang atau jasa dari penjual yang berada di negara lain. Salah satu persoalan dirasakan paling sering muncul adalah tindakan curang dan penipuan.

Indikasi-indikasi tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan secara elektronik yang semakin marak dewasa ini selain memberikan peluang dan berbagai kemudahan di satu sisi, ternyata juga di sisi lain memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi antara lain berupa kemungkinan-kemungkinan kerugian konsumen secara garis



besar dapat dibagi dua. Pertama, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku penjual yang memang secara tidak bertanggung jawab merugikan konsumen. Kedua, kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa tingginya derajat resiko yang dihadapi konsumen harus disertai dengan peningkatan taraf perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. Tanpa dukungan konsumen, Undang-Undang perlindungan Konsumen tidak akan efektif dan efisien. Maka, Undang-Undang perlindungan Konsumen memang harus terus disebar dan disosialisasikan. Pasalnya, walaupun telah berlaku adanya Undang-Undang perlindungan Konsumen, namun masih banyak konsumen yang belum menyadari dan memahami Undang-Undang perlindungan Konsumen ini. Diharapkan dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat membuat konsumen menjadi lebih kritis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Balai POM dalam mengawasi produk makanan di Palangka Raya adalah mereka melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan di Palangka Raya menggunakan 2 tahapan yaitu yaitu *pre market* dan *post market* yaitu dari awal proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum makanan dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas/Badan Ketahanan Pangan, Aparat Penegak Hukum, serta Instansi Lain yang terkait.
2. Pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya di Palangka Raya adalah masih belum optimal dikarenakan jumlah pegawai pengawas peredaran makanan di Kota Palangka Raya masih minim tidak sebanding dengan banyaknya jumlah Kota/Kabupaten dan komoditi yang diawasi BPOM serta rendahnya kepatuhan dan pengetahuan konsumen dan pelaku usaha. Solusi dalam mengatasi hambatan atau kendala BPOM yaitu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi

dan Instansi Lain yang terkait serta BPOM melakukan pemberdayaan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen maupun pelaku usaha melalui kegiatan komunikasi, edukasi, serta informasi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan jaminan Obat dan Makanan aman, sehat, bermanfaat, dan bermutu BPOM hendaknya terus memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan regulasi/standar, penguatan pengawasan *pre-market*, penguatan pengawasan *post-market*, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, perlunya peningkatan frekuensi pengawasan makanan dan minum yang dilakukan secara terencana.
2. Peran pengawasan Obat dan Makanan tidak saja menjadi tanggung jawab Balai POM. Akan tetapi, masyarakat juga mesti ikut terlibat dalam mengawasi dan menggunakan produk makanan. Masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen cerdas yang teliti sebelum membeli dan mengonsumsi obat dan makanan dengan cara mengetahui ciri2 pangan kemasan yang baik, yaitu: 1) Kemasan dalam kondisi baik tidak rusak, penyok atau menggembung; 2). Pangan tidak kedaluwarsa atau rusak; 3). Sudah memiliki nomor izin edar: MD (Pangan yang diproduksi dalam negeri) ML (pangan yang diimpor dari luar negeri) PIRT (pangan yang diproduksi oleh rumah tangga)

sehingga dalam hal ini masyarakat dapat terhindar dari mengonsumsi produk makanan yang tidak aman, tidak sehat, dan berbahaya.

### **C. Keterbatasan penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kejujuran maupun keterbukaan dalam hasil penelitian merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya.
2. Kurangnya peneliti memberikan gambaran secara lebih komprehensif terhadap hasil penelitian karena beberapa menyangkut risiko dan reputasi pihak-pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014
- Abdullah, Junaidi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.
- Abdullah, Thamrin, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Al Albani , Muhammad Nashirudin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arijanto Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Asyhadie,Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kota palangka Raya,*Statistik Kependudukan Kota Palangka Raya 2015*, Palangka raya: Badan pusat Statistik Kota palangka Raya, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah-langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 1990.
- Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Jauhar, Mohammad, *Makanan Halal Menurut Islam*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2009.
- Kartika Sari, Elsi dan Advendi Simangunson, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Laksana, Fajar, *Manajemen Pemasaran; Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Moelong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004.
- Nitisusatro, Mulyadi, *Perilaku Konsumen; Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nuruddin, Amiur, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam: Kajian Sprit Ethico-legal atas Prinsip Tarradin Dalam Praktik Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia, 2014.
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Qadir, Abdul, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2013.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Depok: Gema Insani, 1997.

Saliman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1987.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1987.

Tirtawinata, Tien Ch, *Makanan dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.

#### **Jurnal/Skripsi/Proposal/Surat Kabar**

Surat Kabar Kalteng Pos, Minggu 22 Januari 2017.

Edtriani, Meliza, Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru, Universitas Bina Widya, Pekanbaru, 2012.

Saputra Gaery Rahman, Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten Dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.

Silalahi, Norita Palita, Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) atas beredarnya Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat yang beredar di Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2011.

### **Internet**

Ekhaardi, “Pelaksanaan”, di akses  
dari:<http://ekhardhi.blogspot.co.id/2010/12/pelaksanaan.html>, pada Minggu,  
15 Oktober 2017, pukul 08:00 WIB.

Palangka Raya, “Gambaran Umum Kota Palangka Raya”, di akses dari,  
<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>, pada hari:  
Jumat tanggal 14 April pukul 15.00 wib.

Rozalinda, “Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam”, 2010, di akses dari:  
<https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/10/pengawasan-pasar-perspektif-ekonomi-islam/>, pada hari: Selasa, 03 Januari 2017, pukul 08:00 WIB.

Balai Pengawas Obat dan Makanan, “BPOM”, di akses dari:  
<http://www.pom.go.id>, pada hari:Selasa, 03 Januari 2017, pukul 08:00 WIB.